

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

**PERENCANAAN KOMUNIKASI DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM
MENSOSIALISASIKAN PENCEGAHAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA
PEKANBARU.**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)
Pada Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Riau**



REZKY HIJRIANI

NPM : 169110165
KONSENTRASI : HUMAS
PROGRAM STUDI : ILMU KOMUNIKASI.

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU

2021

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Teruntuk keluargaku tercinta, Keluarga besar Universitas Islam Riau,
Untuk semua orang yang kusayangi....”

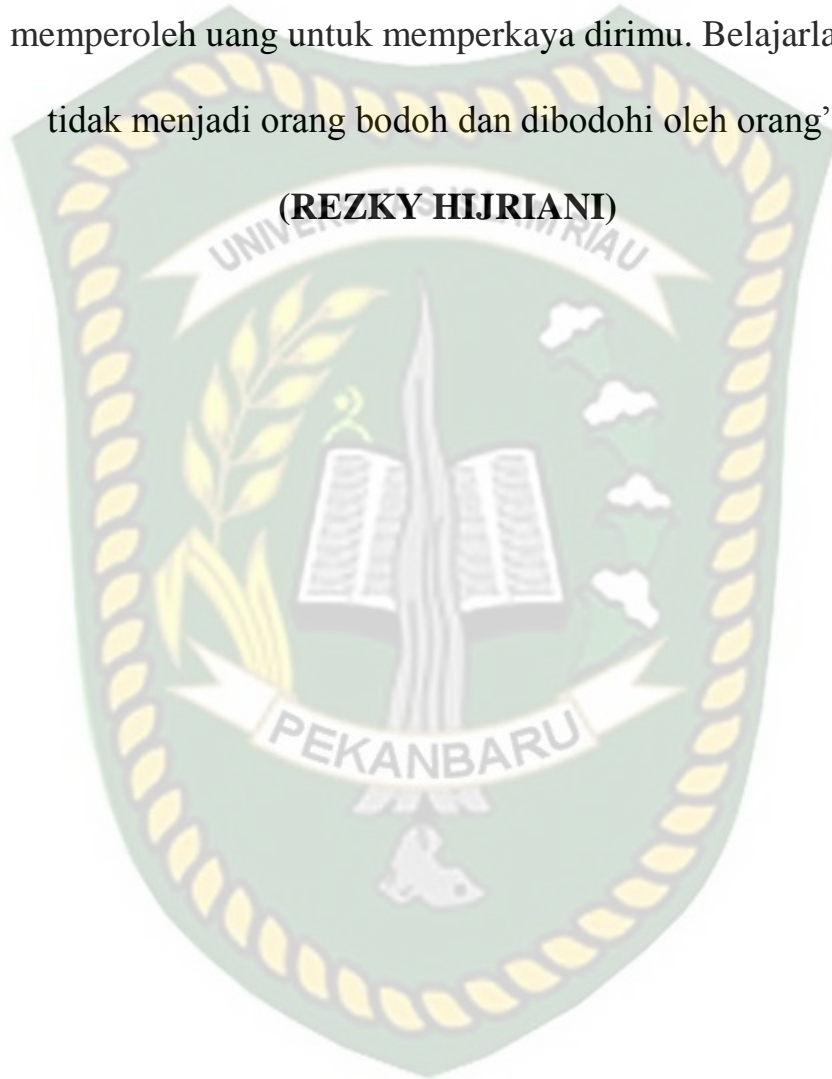
Terimakasih atas bantuan, doa dan motivasi yang telah diberikan.



MOTO

“Jangan jadikan pendidikan sebagai alat untuk mendapatkan harta, demi memperoleh uang untuk memperkaya dirimu. Belajarlah supaya tidak menjadi orang bodoh dan dibodohi oleh orang”.

(REZKY HIJRIANI)



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan kasih dan sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan usulan penelitian ini dengan baik. Dengan judul Penelitian "Perencanaan Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Mensosialisasikan Pencegahan kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Pekanbaru" Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar sarjana Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau.

Penulis mengakui bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak niscaya penelitian ini tidak akan dapat terwujud. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan ribuan terimakasih yang dalam kepada:

1. Dr. Muhd Ar. Imam Riauan, S.sos., M.I.Kom, selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau.
2. Al Sukri, M.I.kom., selaku pembimbing yang sudah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan kepada penulis melalui petunjuk dan saran yang diberikan selama menyelesaikan penelitian ini.
3. Cutra Aslinda, M.I.Kom., Selaku Pembimbing Akademik (PA) dan Wakil Dekan I yang sudah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan

kepada penulis melalui petunjuk dan saran yang diberikan selama menyelesaikan penelitian ini.

4. Dosen program studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau, yang sudah membekali penelitian ini dengan berbagai ilmu yang bermanfaat serta tidak lupa tenaga administrasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau yang lain sudah memberikan kemudahan kepada penulis selama proses pendidikan berlangsung.
5. Ayah dan Ibu yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa terbaik untuk kesuksesan penulis.
6. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 16, yang selalu memberikan penulis semangat dan membuat penulis percaya diri untuk segera menyelesaikan penelitian ini.

Penelitian ini telah penulis selesaikan dengan maksimal mungkin, jika dalam Skripsi ini terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penulisan dan isi, Maka penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun penelitian ini. semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 04 juli 2021

Penulis

Rezky Hijriani

(169110165)

DAFTAR ISI

	Halaman
<i>COVER</i>	
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	9
1. Komunikasi	9
2. Komponen Komunikasi	11
3. Fungsi dan Tujuan Komunikasi	11
4. Proses Komunikasi	14
5. Model Komunikasi.....	15
6. Perencanaan Komunikasi	16
7. Sosialisasi	29

8. Kekerasan	30
B. Defenisi Operasional	36
C. Penelitian Terdahulu.....	37

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian	43
C. Subjek dan Objek Penelitian	45
D. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Teknik Analisis Data	46

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum	48
1. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	48
2. Visi dan Misi	49
3. Identitas Informan	51
B. Hasil Penelitian.....	52
1. Perencanaan Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Mensosialisasikan Program Pencegahan Kekerasan	52
2. Hasil Perencanaan Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Mensosialisasikan Program Pencegahan Kekerasan	80
C. Pembahasan Penelitian	82
1. Pengumpulan <i>Data Baseline</i> dan <i>Need Assesment</i>	82
2. Perumusan Tujuan Komunikasi	83
3. Analisis Perencanaan dan Pengembangan Strategi	84
4. Analisis dan Segmentasi Khalayak	87
5. Pemilihan Media	88
6. Desain dan Pengembangan Pesan	92
7. Perencanaan Manajemen.....	93
8. Pelaksanaan Pelatihan	96

9. Implementasi	98
10. Evaluasi Program	99

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102

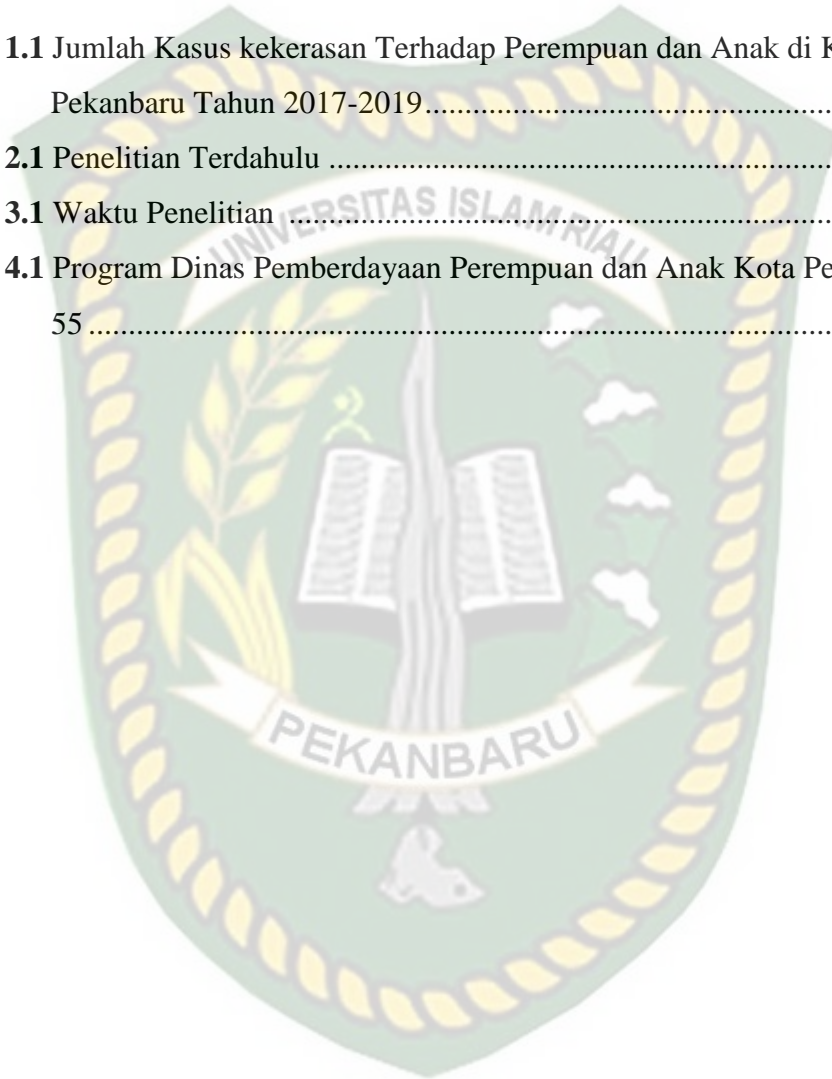
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	37
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	45
Tabel 4.1 Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru 55	79



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Tata cara untuk Pelaporan Korban Kekerasan DPPA	6
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru	49
Gambar 4.2 Fasilitas Pelayanan dan pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	74
Gambar 4.4 Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Mensosialisasikan Program Pencegahan Kekerasan.....	81

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Pertanyaan Wawancara	105
2. Lampiran Dokumentasi Wawancara	108
3. Lampiran Dokumentasi Penelitian	113



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

ABSTRAK**Perencanaan Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Mensosialisasikan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Pekanbaru.**

Rezky Hijriani
(169110165)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan komunikasi dinas pemberdayaan perempuan dan anak dalam mensosialisasikan program mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dari hasil wawancara ditemukan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru telah melaksanakan beberapa langkah dalam merumuskan strategi komunikasi sosialisasi, mulai dari mengenal khalayak, menyusun pesan, menetapkan metode hingga seleksi dan penggunaan media. Dalam pelaksanaan pencegahan ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan kerja sama dengan beberapa instansi lainnya di Kota Pekanbaru seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Kepolisian, Akademisi, Pengacara, LSM, masyarakat dan instansi-instansi lainnya. Akhirnya penulis menyarankan agar pihak instansi terkait agar dapat mempertahankan regulasi yang telah dibangun mengenai alur hukum hingga pendampingan terhadap korban yang mengalami kekerasan.

Kata Kunci : Perencanaan Komunikasi, Pencegahan Kekerasan, Perempuan dan Anak

ABSTRACT

***Communication Planning of the Office of Women and Children Empowerment
in Disseminating the Prevention of Violence against Women and Children in
Pekanbaru City.***

Rezky Hijriani
169110165

This study aims to determine the communication planning of the women and children empowerment office in disseminating programs regarding the prevention of violence against women and children in the city of Pekanbaru. This research is a qualitative research with a descriptive approach. From the interviews, it was found that the Pekanbaru City Women's and Children's Empowerment Service had implemented several steps in formulating a communication strategy for socialization, starting from getting to know the audience, compiling messages, determining methods to selecting and using media. In implementing this prevention, the Office of Women's Empowerment and Child Protection cooperates with several other agencies in Pekanbaru City such as the Education Office, Social Service, Trade Office, Health Service, Police, Academics, Lawyers, NGOs, the community and other agencies. Finally, the author suggests that the relevant agencies can maintain the regulations that have been built regarding the legal flow to assistance to victims who experience violence.

Keywords: *Communication Planning, Prevention of Violence, Women and Children*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. itulah sebabnya perbuatan kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga dibutuhkan suatu instrumen hukum nasional tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia (Erlinda, 2016:13).

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak berkisar dari bentuk yang ringan sampai yang berat juga mengenal modus operandinya. berita-berita tentang meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dalam tahun-tahun terakhir ini sudah sangat memprihatinkan masyarakat (Erlinda, 2016:13).

Selain itu kekerasan juga sering terjadi pada anak-anak. dunia anak yang seharusnya diwarnai oleh kegiatan belajar, bermain dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan, realitasnya masih cenderung mengalami kekerasan oleh orang dewasa yang seharusnya menjadi pelindung anak. berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan dapat mengakibatkan cedera atau kerugian terhadap kesehatan, kelangsungan hidup, tumbuh kembang atau martabat, bahkan ada beberapa anak yang mengalami gangguan ini hingga meninggal dunia (Erlinda, 2016:13).

Secara logis, kekerasan terhadap anak sering diikuti dengan tindakan-tindakan yang tidak senonoh. Seperti: pemerkosaan, pembunuhan, pencabulan dan pelecehan seksual. Hal inilah yang membuktikan, jika kekerasan terhadap anak menjadi masalah yang perlu ditangani secara mendalam, dan apabila diabaikan secara terus menerus maka anak yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa akan hilang perannya di masa yang akan datang.

Sebagai generasi penerus bangsa, anak selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhannya secara memadai. mereka bukanlah sasaran atas tindakan yang tidak manusiawi dari orang lain atau pihak manapun. mereka harus diasuh, dirawat, dan di didik dengan baik, agar mampu menjadi pribadi yang sehat dan terhindar dari kekerasan. dalam hal ini, anak bukanlah semata-mata tanggung jawab dari orang tua, melainkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah seharusnya berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak. Pemerintah dalam hal ini yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang berfungsi untuk menjamin hak-hak anak yang mengalami tindakan dari berbagai pihak dan sudah sepatutnya menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi pada anak. salah satu wilayah dengan tingkat tindak kekerasan perempuan yang semakin meningkat adalah kota Pekanbaru.

Tindakan kekerasan Perempuan dan Anak memiliki dampak yang cukup serius untuk para korban atau anak-anak. misalnya pada kesehatan Fisik dapat berupa luka memar, cedera bagian luar dan dalam, gangguan kesehatan yang kronis, terinfeksi penyakit menular seksual, *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome* (HIV/AIDS). Kesehatan mentalnya

dapat berupa depresi, ketakutan, harga diri rendah, disfungsi seksual, gangguan stress pasca trauma dan dampak fatalnya bunuh diri, membunuh/ melukai pelaku, kematian karena aborsi.

Organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan tercapainya sebuah tujuan, manajemen organisasi dapat mengukur kinerja yang ada pada organisasi tersebut. setiap organisasi publik harus bekerja sebaik mungkin dalam melayani masyarakatnya. setiap organisasi memiliki strategi organisasi untuk mengukur keaktifan dari organisasi tersebut (Amir Syarif Hidayat, 2015:78).

Organisasi publik memiliki misi yang sangat strategis yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. dengan mengingatnya isu kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sangat ironis dan menjadi masalah yang memprihatinkan merupakan tugas organisasi publik untuk mengatasinya. munculnya beberapa kasus seperti tindak kriminalitas, kerusakan moral, pemerkosaan, penganiayaan, pelecehan seksual dan anak-anak yang menjadi korbannya. tindakan kekerasan terhadap anak Ini dapat terjadi di dalam rumah tangga (domestik) maupun di masyarakat (Amir Syarif Hidayat, 2015:78)

Peranan organisasi publik sangat berpengaruh terhadap permasalahan yang ada dan partisipasi pemerintah juga diharapkan oleh masyarakat mampu untuk mengatasi masalah tersebut. masyarakat sangat berharap penuh kepada pemerintah dikarenakan setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman, adil,

dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. pemerintah sudah seharusnya memperhatikan hak-hak perempuan dengan mengingatnya kasus-kasus yang terjadi pada anak-anak sudah sangat besar. organisasi publik yang menangani kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di kota Pekanbaru adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di kota Pekanbaru. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DPPA) merupakan instansi pemerintah atau organisasi publik yang memiliki misi yang sangat strategis. membebaskan perempuan dari masalah-masalah tersebut merupakan suatu tugas wajib dari fungsi pemerintah yang bergerak di bidang tersebut.

Tabel 1.1 Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019

Jenis Kasus	2017	2018	2019
Kekerasan Terhadap Anak	4	8	13
Kekerasan dalam Rumah Tangga	14	19	20
Pelantaran	9	3	2
Hak Anak	2	17	27
Hak Asuh Anak	14	4	3
Anak Berhadapan Hukum	4	4	19
Kenakalan Anak	5	0	1
Trafficking	0	0	0
Pencabulan	20	32	37
Pencabulan (Saksi)	-	-	1
Kekerasan Berbasis gender	2	6	7
Total	74	93	130

Sumber: DPPA Pekanbaru, 2020

Menurut Seksi Informasi dan Data Dinas Pemberdayaan perempuan dan anak, Kaspul Bahri, Kasus kekerasan pada Anak dan Perempuan di Pekanbaru berupa pencabulan, pemerkosaan dan kekerasan lainnya umumnya terjadi di ruang lingkungan sekolah dan sekitar lingkungan rumah. (Hasil Wawancara dengan Seksi Informasi dan Data 28 Januari 2021).

Dari Tabel diatas kasus meningkat drastic. pada tahun 2017-2018 kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anaknaik hingga 25% dan dilihat dari hasil data kasus kekerasan Perempuan dan Anak tahun 2018-2019 semakin mengalami peningkatan hingga 40%. data presentase Kekerasan Perempuan dan anak mencapai 65%. pada dari hasil data keseluruhan Pencabulan paling banyak terjadi pada kasus kekerasan anak. kebanyakan pelaku kasus Pencabulan terhadap anak adalah orang dekat korban. Sementara, kasus yang sedikitnya terjadi adalah kasus Trafficking. kasus kekerasan anak menjadi perhatian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Pekanbaru. banyak kasus kekerasan ini disebabkan dua faktor. faktor pertama yakni kasus yang meningkat. faktor kedua yakni kesadaran untuk melaporkan kasus kekerasan mengalami peningkatan.

Dinas PPPA tidak hanya memiliki tugas sebagai mengatasi permasalahan pada tindak kekerasan namun juga harus berpegang teguh pada upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak. pencegahan juga tidak lupa dilakukan oleh Dinas PPPA dengan cara sosialisasi kepada perempuan anak-anak yang mengalami kekerasan bahwa dianjurkan untuk melapor. jangan takut untuk melapor walaupun

hanya baru sekali mendapatkan perlakuan kasar, karena biasanya kasus-kasus kekerasan banyak terjadi di tengah-tengah keluarga maupun orang-orang terdekat.

Gambar 1.1 Tata cara untuk Pelaporan Korban Kekerasan DPPA



Sumber Data: DPPA Pekanbaru

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang utama adalah memberikan pelayanan melalui upaya-upaya pemberian perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Perempuan dan anak sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu Negara merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak – hak yang dimilikinya secara asasi. Peran Dinas PP&PA dalam menjalankan program pencegahan kekerasan terhadap umat adalah dengan membuat program sosialisasi. Untuk melaksanakan sosialisasi ini diperlukan adanya perencanaan komunikasi yang matang sehingga sosialisasi ini tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan pelaksanaannya. Perencanaan komunikasi adalah faktor penting dalam menjamin terlaksananya program sosialisasi yang efisien dan tepat sasaran.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul sebagai berikut: **Perencanaan Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Mensosialisasikan Program Mengenai Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Pekanbaru.**

B. Identifikasi Masalah

Berikut adalah identifikasi masalah dalam penelitian yang dilakukan:

1. Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Pekanbaru setiap tahunnya semakin meningkat.
2. Perlunya Lebih Intensif sosialisasi dan komunikasi Dinas PP&PA dalam menanggulangi kekerasan terhadap Perempuan dan anak di Kota Pekanbaru.
3. Perempuan dan anak selalu menjadi sasaran kekerasan di dalam masyarakat.

C. Fokus Penelitian

Fokus kajian dalam penelitian adalah mengenai Perencanaan Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Mensosialisasikan Program Mengenai Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Pekanbaru.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Perencanaan Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Mensosialisasikan Program Mengenai Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Pekanbaru.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perencanaan Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Mensosialisasikan Program Mengenai Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam perkembangan ilmu komunikasi dan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan saran bagi Dinas PP&PA dalam menanggulangi kekerasan terhadap Perempuan dan anak di Kota Pekanbaru.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Komunikasi

Dengan komunikasi, manusia dapat bertukar pendapat, ilmu dan pengalaman serta mempengaruhi ataupun menghibur lawan komunikasi. Kata komunikasi atau *communication* dalam bahasa Inggris berasal dari kata latin *communis* yang berarti “sama”, *communico*, *communicatio*, atau *communicare* yang berarti membuat sama (*to make common*), sama disini maksudnya adalah sama makna. Jadi komunikasi langsung apabila antara orang-orang yang terlibat terdapat kesamaan makna mengenai suatu hal yang di komunikasikan.

Menurut Hovland menjelaskan bahwa “ ilmu komunikasi adalah upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas asas- asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap” (Effendy, 2003:34). Definisi Hovland menunjukkan bahwa yang dijadikan objek studi ilmu komunikasi tidak hanya penyampaian informasi, melainkan juga pembentukan pendapat umum (*public opinion*) dan sikap publik (*public attitude*) yang dalam kehidupan sosial memainkan peranan yang sangat penting. dalam definisinya secara khusus Hovland menjelaskan bahwa komunikasi adalah proses mengubah perilaku orang lain (*communication is the process to modify the behavior of other individuals*).

Roger menerangkan bahwa “komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka” (Cangara, 2015:67). dengan demikian proses komunikasi yang terjadi telah menunjukkan suatu sistem yang dinamis dalam memberikan persamaan pandangan antara penyampaian pesan dengan penerima pesan. komunikasi dapat dipandang baik dan efektif sejauh ide, informasi, dan hal yang berhubungan dengan isi dalam proses komunikasi, dimiliki bersama atau mempunyai kebersamaan arti bagi orang-orang yang terlibat dalam komunikasi tertentu.

Model dasar komunikasi yang dibuat aristoteles mempengaruhi Harold. D lasswell, seorang sarjana politik Amerika yang kemudian membuat model komunikasi yang di kenal dengan formula Lasswell. Model komunikasi yang di buat oleh Aristotles adalah model analisis dasar komunikasi. Model komunikasi Aristoteles meliputi Sumber, Pesan dan Penerima. (Amir Syarif Hidayat, 2015:118).

Kalau pertanyaan *Lasswell* divisualisasikan dalam gambar, dapat dinilai sebagai model komunikasi, sebab komponen-komponen yang membangun cukup signifikan. disini lasswell melihat bahwa suatu proses komunikasi selalu mempunyai efek atau pengaruh. oleh karena itu, tidak mengherankan kalau model ini banyak menstimuli riset komukasi, khusus nya komunikasi massa dan komunikasi politik (Cangara, 2015:57).

2. Komponen Komunikasi

Komunikasi itu sendiri memiliki komponen – komponen yang terdapat pada komunikasi. dari pengertian komunikasi sebagaimana diutarakan diatas tampak adanya sejumlah komponen atau unsur yang dicakup, yang merupakan persyaratan terjadinya komunikasi.

Menurut Onong Uchjana Effendy dalam bukunya *Dinamika Komunikasi*, lingkup Ilmu Komunikasi berdasarkan komponennya terdiri dari:

1. Komunikator (Communicator): Orang yang menyampaikan pesan
2. Pesan (Message): Pernyataan yang didukung oleh lambing
3. Komunikan (Communican): Orang yang menerima pesan
4. Media (Media): Sarana atau saluran yang mendukung pesan bila komunikan jauh tempatnya atau banyak jumlahnya.
5. Efek (Effect): Dampak sebagai pengaruh dari pesan. (Effendy, 2013:6)

Maka, komunikasi merupakan proses dimana tak luput dari siapa yang menyampaikan, pesan apa, kepada siapa, menggunakan media apa, dan efek yang diperoleh. komponen tersebut menjalankan prosesnya dengan berbagai cara untuk menyampaikan suatu gagasannya.

3. Fungsi dan Tujuan Komunikasi

Begitu pentingnya komunikasi dalam hidup manusia, sehingga komunikasi itu sendiri memiliki fungsi-fungsi dalam kehidupan manusia. Maka menurut Harold D. Lasswell dalam buku *Cangara* berjudul *Perencanaan dan Strategi Komunikasi* (2013:112) , mengemukakan bahwa fungsi komunikasi antara lain :

1. Manusia dapat mengontrol lingkungannya
2. Beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka berada
3. Melakukan transformasi warisan sosial kepada generasi berikutnya.
(Cangara, 2013:112)

Berbeda dengan Onong Uchjana Effendy dalam bukunya Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, fungsi komunikasi terdiri sebagai berikut:

1. Menyampaikan Informasi (to inform)
2. Mendidik (to educate)
3. Menghibur (to entertain)
4. Mempengaruhi (to influence). (Effendy, 2004:8)

Adapun dalam buku Ilmu Komunikasi oleh Widjaja (2000:40), komunikasi dipandang dalam arti luas sebagai pertukaran berita dan adapun dalam buku Ilmu Komunikasi oleh Widjaja, komunikasi dipandang dalam arti luas sebagai pertukaran berita dan pesan, tetapi sebagai kegiatan individu dan kelompok mengenai tukar menukar data, fakta dan ide maka fungsinya dalam setiap sistem sosial adalah sebagai berikut;

1. Informasi, pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, penyebaran berita, data, gambar, fakta, pesan, opini, dan komentar yang dibutuhkan agar dapat dimengerti dan bereaksi secara jelas terhadap kondisi lingkungan dan orang lain agar dapat mengambil keputusan yang tepat.

2. Sosialisasi (pemasyarakatan), penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif sehingga ia sadar akan fungsi sosialnya dan dapat aktif di dalam masyarakat.
3. Motivasi, menjelaskan tujuan setiap masyarakat jangka pendek maupun jangka panjang, mendorong orang menentukan pilihan dan keinginannya, mendorong kegiatan individu dan kelompok berdasarkan tujuan bersama yang akan dikejar.
4. Perdebatan dan diskusi, menyediakan dan saling menukar fakta yang diperlukan untuk memungkinkan persetujuan atau menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai masalah publik, menyediakan bukti-bukti relevan yang diperlukan untuk kepentingan umum agar masyarakat lebih melibatkan diri dengan masalah yang menyangkut kepentingan bersama
5. Pendidikan, pengalihan ilmu pengetahuan dapat mendorong perkembangan intelektual, pembentukan watak, serta membentuk keterampilan dan kemahiran yang diperlukan pada semua bidang kehidupan.
6. Memajukan kehidupan, menyebarkan hasil kebudayaan dan seni dengan maksud melestarikan warisan masa lalu, mengembangkan kebudayaan dengan memperluas horizon seseorang, serta membangun imajinasi dan mendorong kreativitas dan kebutuhan estetikanya.

7. Hiburan, penyebarluasan sinyal, simbol, suara dan imajinasi dari drama, tari, kesenian, kesusatraan, musik, olahraga, kesenangan kelompok, dan individu
8. Integrasi, menyediakan bagi bangsa, kelompok, dan individu kesempatan untuk memperoleh berbagai pesan yang mereka perlukan agar mereka dapat saling kenal dan mengerti serta menghargai kondisi pandangan dan keinginan orang lain. (Widjaja, 2000: 65-66)

4. Proses Komunikasi

Proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan). Menurut Onong Uchjana Effendy, proses komunikasi dalam bukunya Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, proses komunikasi terbagi menjadi dua tahap, yakni:

1. Proses komunikasi secara primer, proses ini adalah proses penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambing (Symbol) sebagai media. Lambing sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah bahasa, kial, isyarat, gambar, warna dan lain sebagainya yang secara langsung mamou “menerjemahkan” pikiran dan atau perasaan komunikator kepada komunikan.
2. Proses komunikasi secara sekunder, adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana

sebagai media kedua setelah memakai lambing sebagai media pertama. seorang menggunakan media kedua dalam melancarkan komunikasinya karena komunikan sebagai sasarannya berada di tempat yang relatif jauh atau jumlahnya banyak. Surat, telepon, teleks, surat kabar, majalah, radio, televise, film dan banyak lagi media kedua yang sering digunakan dalam komunikasi. (Effendy, 2004:11&16).

5. Model Komunikasi

Proses penyampaian pesan atau komunikasi memiliki karakteristik tersendiri, menurut Sasa Djuarsa Sendjaja dalam bukunya diperoleh gambaran bahwa pengertian komunikasi memiliki karakteristik komunikasi, yaitu:

1. Komunikasi adalah suatu proses, Artinya bahwa komunikasi merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan (ada tahapan atau sekuensi) serta berkaitan sama lainnya dalam kurun waktu tertentu.
2. Komunikasi dalam upaya yang disengaja serta mempunyai tujuan, Komunikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar, disengaja serta sesuai dengan tujuan atau keinginan dari pelakunya.
3. Komunikasi menurut adanya partisipasi dan kerja sama dari para pelaku yang terlibat, Kegiatan komunikasi akan berlangsung baik, apabila pihak-pihak yang berkomunikasi (dua orang atau lebih) sama-sama ikut terlibat dan sama-sama mempunyai perhatian yang sama terhadap topik pesan yang dikomunikasikan

4. Komunikasi bersifat simbolis, Dimana komunikasi pada dasarnya merupakan tindakan yang dilakukan dengan menggunakan lambang-lambang
5. Komunikasi bersifat transaksional, Pada dasarnya menuntut dua tindakan: memberi dan menerima. Dua tindakan tersebut tentunya pula dilakukan secara seimbang atau proporsional oleh masing-masing, pelaku yang terlibat dalam komunikasi.
6. Komunikasi menembus faktor ruang dan waktu, Komunikasi menembus faktor waktu dan ruang maksudnya bahwa para peserta atau pelaku yang terlibat dalam komunikasi tidak harus hadir pada waktu serta tempat yang sama. (Sendjaja, 2004:1.13-1.16)

6. Perencanaan Komunikasi

a. Pengertian Perencanaan Komunikasi

Perencanaan komunikasi adalah suatu usaha yang sistematis dan kontinu dalam mengorganisir aktivitas manusia terhadap upaya penggunaan sumberdaya komunikasi secara efisien guna merealisasikan kebijakan- kebijakan komunikasi (Nasution, 2004:24).

Perencanaan komunikasi adalah sebuah dokumen tertulis yang menggambarkan tentang apa yang harus dilakukan yang berhubungan dengan komunikasi dalam pencapaian tujuan, dengan cara apa yang dapat dilakukan sehingga tujuan tersebut dapat dicapai, dan kepada siapa program komunikasi itu ditujukan, dengan peralatan dan dalam jangka waktu berapa lama hal itu bisa

dicapai, dan bagaimana cara mengukur (evaluasi) hasil-hasil yang diperoleh dari program tersebut (Hamijoyo, 2005:59).

Hal ini juga diakui bahwa tidak ada satupun model perencanaan komunikasi yang bisa diterima secara umum, melainkan bisa dilakukan modifikasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. penetapan strategi dalam perencanaan komunikasi, tentu saja tidak lepas dari elemen komunikasi. pengertian komunikasi yang dibuat oleh Harold D. Lasswell menyatakan bahwa cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi ialah dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut: *Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect?*.

Jadi dalam komunikasi ada beberapa elemen, yaitu Komunikator, komunikan, media, pesan, efek. Karena itu strategi yang dijalankan dalam perencanaan komunikasi harus diawali dengan langkah-langkah sebagai berikut (Effendy, 2000:15):

- a. Menetapkan komunikator. dalam berbagai kajian komunikasi, komunikator menjadi sumber dan kendali semua aktivitas komunikasi. Sebagai pelaku utama dalam aktivitas komunikasi, komunikator memegang peranan yang sangat penting. untuk itu, seorang komunikator yang akan bertindak sebagai ujung tombak suatu program harus terampil berkomunikasi, kaya ide, serta penuh daya kreativitas. ada syarat yang harus dimiliki seorang komunikator yakni; kredibilitas, daya tarik, dan kekuatan.

- b. Menetapkan target sasaran dan analisis kebutuhan khalayak. dalam studi komunikasi, khalayak atau disebut juga komunikan. Proses mengidentifikasi dan mengkategorisasikan khalayak sasaran komunikasi. dalam hal ini perlu ditetapkan urutan prioritas kategori khalayak sasaran: siapa yang menjadi sasaran utama (sasaran primer) dan siapa yang menjadi sasaran antara (sasaran sekunder) Sasaran utama, misalnya, masyarakat perkotaan yang berpenghasilan rendah, sedangkan sasaran antara adalah kelompok orang yang memiliki otoritas dan kepemimpinan terhadap sasaran utama, misalnya: tokoh masyarakat, pimpinan perusahaan, para pejabat, para komandan, dan sebagainya. Setiap kelompok sasaran ini harus benar-benar diidentifikasi secara cermat ciri karakteristik sosiodemografis dan psikografisnya. dalam menentukan prioritas sasaran, tidak selalu menempatkan khalayak sasaran primer sebagai sebagai prioritas pertama kegiatan komunikasi, melainkan dapat saling bertukar tergantung pada situasi dan konteks komunikasinya. untuk kegiatan komunikasi yang memanfaatkan konteks organisasional atau kelompok (pendekatan kelompok), maka sasaran prioritas komunikasi adalah para pemegang otoritas, sedangkan untuk kegiatan komunikasi dalam konteks sosial (pendekatan masal) maka sasaran prioritasnya adalah individu-individu atau khalayak sasaran utama program. di dalam masyarakat ada kelompok-kelompok yang menentukan besarnya pengaruh suatu program, yaitu: (a) Kelompok yang memberi izin,

adalah suatu lembaga yang membuat peraturan dan memberi izin sebelum suatu program disebarluaskan. (b) Kelompok pendukung, ialah kelompok yang mendukung dan setuju pada program yang dilaksanakan. (c) kelompok oposisi, ialah mereka yang menentang atau kelompok yang bertentangan dengan ide perubahan yang ingin dilaksanakan. (d) Kelompok evaluasi, ialah mereka yang terdiri dari orang-orang yang mengkritisi dan memonitor jalannya suatu program.

- c. Menyusun pesan. Pesan adalah segala sesuatu yang disampaikan oleh seseorang dalam bentuk simbol yang dipersepsi dan diterima oleh komunikan dalam serangkaian makna.
- d. Memilih media dan saluran komunikasi. memilih media komunikasi harus mempertimbangkan karakteristik isi dan tujuan isi pesan yang ingin disampaikan. untuk masyarakat luas, pesan sebaiknya disalurkan melalui media massa, misalnya surat kabar atau televisi, dan untuk kelompok tertentu digunakan saluran komunikasi kelompok.
- e. Efek komunikasi. Semua program komunikasi yang dilakukan mempunyai tujuan, yakni mempengaruhi target sasaran. Pengaruh bisa terjadi dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku. pada tingkat pengetahuan, pengaruh bisa terjadi dalam bentuk perubahan persepsi dan perubahan pendapat. adapun yang dimaksud dengan perubahan sikap, ialah adanya perubahan internal pada diri seseorang yang diorganisir dalam bentuk prinsip, sebagai hasil evaluasi yang

dilakukannya terhadap suatu objek, sedangkan perubahan perilaku adalah perubahan yang terjadi dalam bentuk tindakan.

Pentingnya Perencanaan dan Strategi Komunikasi dalam sebuah proses komunikasi yang dilaksanakan tidak luput dari berbagai rintangan atau hambatan. Oleh karena itu, perencanaan komunikasi dimaksudkan untuk mengatasi rintangan-rintangan yang ada guna mencapai efektivitas komunikasi, sedangkan dari fungsi dan kegunaan komunikasi perencanaan diperlukan untuk mengimplementasikan program-program yang ingin dicapai. Perencanaan komunikasi dalam kerangka yang sangat sederhana dikaitkan dengan bagaimana menciptakan komunikasi yang efektif. dalam kerangka yang lebih luas perencanaan komunikasi sangat diperlukan untuk menyusun strategi agar program yang berskala nasional bisa berhasil.

Dengan demikian maka perencanaan komunikasi menjadi hal yang sangat esensial bagi keberhasilan suatu organisasi. Perencanaan dan strategi komunikasi diperlukan dalam proses komunikasi agar dapat menciptakan komunikasi yang efektif. Komunikasi perlu ditempatkan pada fungsinya, bukan hanya untuk membangkitkan kesadaran, memberi informasi, mempengaruhi atau mengubah perilaku, melainkan komunikasi juga berfungsi untuk mendengarkan, mengeksplorasi lebih dalam, memahami, memberdayakan, dan membangun konsensus untuk perubahan. Karena itu, komunikasi sangat diperlukan untuk mendukung proses komunikasi organisasi.

b. Tipe perencanaan Komunikasi

Perencanaan komunikasi pada dasarnya dapat dibedakan atas dua tipe, yakni (Cangara, 2013:78) :

- 1) Perencanaan komunikasi strategi adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia). Perencanaan komunikasi strategik ini mengacu pada undang-undang peraturan pemerintah, maupun nilai-nilai dan budaya yang terdapat dalam masyarakat atau organisasi yang dijabarkan dalam bentuk visi, dan misi serta tujuan yang ingin dicapai suatu negara. perencanaan ini digolongkan sebagai perencanaan komunikasi jangka panjang.
- 2) Perencanaan komunikasi operasional ialah perencanaan yang memerlukan tindakan dalam bentuk aktivitas yang dirancang untuk mencapai tujuan. Perencanaan komunikasi operasional dibagi atas dua:
 - a) Perencanaan infrastruktur komunikasi (hardware) bisa disebut perencanaan teknik atau physical planning karena menyangkut pengadaan alat-alat komunikasi
 - b) Perencanaan program komunikasi (software) merupakan perencanaan yang mengarah pada knowledge resource yang mencakup pengetahuan, talenta, struktur organisasi dan penyusunan program kerja tentang kegiatan komunikasi apa yang dilakukan.

c. Pendekatan Perencanaan Komunikasi

Banfield dan Meyeson dalam D. Solihin menyatakan pendekatan perencanaan pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua cara, yakni (Cangara, 2013:78) :

- 1) Pendekatan perencanaan rasional menyeluruh ialah pendekatan perencanaan yang dilandasi suatu kebijakan umum yang merumuskan tujuan yang ingin dicapai sebagai satu kesatuan. didasari oleh seperangkat spesifikasi tujuan yang lengkap menyeluruh dan terpadu serta peramalan yang tepat dan ditunjang oleh sistem informasi
- 2) Pendekatan perencanaan terpilih ialah perencanaan yang mempertimbangkan bagian-bagian kebijaksanaan umum yang berkaitan dengan unsur atau subsistem yang diprioritaskan dan dalam pelaksanaannya lebih mudah dan realistik.

d. Hakikat Perencanaan Komunikasi

Hakikat perencanaan komunikasi dapat dilihat dalam konteks (Amir Syarif

Hidayat, 2015:74) :

- 1) Perencanaan komunikasi sebagai proses, menggunakan dua isu pokok yakni: a) perencanaan itu sendiri sebagai penerapan teori b) Perencanaan itu sendiri sebagai proses, dimana teori digunakan untuk mendapatkan alternative didalam mengorganisir fungsi-fungsi perencanaan.

- 2) Perencanaan komunikasi sebagai sistem, yakni komunikasi harus dilihat sebagai bagian integral dari suatu perencanaan nasional yang kedudukannya sama dengan perencanaan sektor lain.
- 3) Perencanaan komunikasi sebagai alih teknologi dipandang sebagai sesuatu yang misterius. Webster meragukan perencanaan komunikasi dapat membuat royeksi penggunaan teknologi dimasa depan karena perubahan ICT (*Information, communication dan technology*) sangat cepat dan drastis. Sejauh mana program-program komunikasi dapat dilaksanakan dengan tetap memperhitungkan tingkat efisien dan benvitas yang menguntungkan
- 4) perencanaan Komunikasi sebagai evaluasi untuk mendapatkan hasil yang efektif dari pelaksanaan program. terutama untuk melakukan revisi atau perubahan jika dalam proses pelaksanaannya tidak sesuai dengan garis kerja yang telah ditetapkan.

e. Beberapa Masalah yang Perlu Mendapat Perhatian dalam Penyusunan Perencanaan Komunikasi

Dalam penyusunan perencanaan komunikasi, adanya masalah yang perlu dilihat yaitu (Amir Syarif Hidayat, 2015:76) :

- 1) Regulasi internasional, dalam penyusunan perencanaan komunikasi yang berskala internasional dan nasional, sedapat mungkin memberi perhatian terhadap regulasi atau peraturan-peraturan yang dilakukan secara internasional.

- 2) Kebijakan nasional, penyusunan perencanaan komunikasi juga tidak boleh mengabaikan kebijakan nasional, baik yang tercantum didalam perencanaan pembangunan nasional maupun regulasi atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- 3) Desentralisasi, perencanaan yang berskala nasional umumnya dilakukan secara sentral oleh pemerintah pusat, dan sering menimbulkan rasa enggan untuk mendelegasikan ketingkat daerah.
- 4) Kordinasi, komunikasi dan koordinasi sebagai sumber daya maupun sebagai sarana boleh dikatakan diperlukan hampir disemua level masyarakat. oleh karena itu didalam pengelolaan diperlukan koordinasi, baik secara vertical antara pusat dan daerah maupun koordinasi horizontal antara kementerian atau departemen yang mengoprasionalkan sumber daya komunikasi
- 5) Distribusi, sebagai saran yang bisa mendekatkan jarak dan menembus ruang, waktu dan wilayah memerlukan perencanaan dengan memerhatikan kebutuhan
- 6) Partisipasi dan umpan balik, proses penyebaran informasi tidak boleh berlangsung hanya satu arah (*one way*), tapi diharapkan bisa menumbuhkan partipasi dalam bentuk umpan balik dari masyarkat (*two way communication*). Umpan balik diperlukan misalnya untuk mengetahui sampai tidaknya informasi yang disebarakan.

- 7) Riset dan evaluasi, kebutuhan akan hasil penelitian (riset) untuk mengembangkan program komunikasi sangat diperlukan dan menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun perencanaan komunikasi.
- 8) Tenaga dan pelatihan, masalah sumber daya manusia dalam komunikasi memang bisa menjadi krusial jika tidak ditangani oleh hati-hati. karena bisa muncul persoalan ketidakseimbangan antara sumber daya manusia yang menggerakkan dengan peralatan (infrastruktur) yang tersedia.
- 9) Integritas, perencanaan komunikasi harus mempertimbangkan persoalan integritas, komunikasi dalam hal ini industri media sering kali terseret tanpa disadari oleh alat kapitalis dengan melupakan fungsi-fungsi sosialnya sebagai pengayom masyarakat (*social Responsibility*).
- 10) Pemilikan media, Pola pemilikan media sangat bergantung pada sistem komunikasi yang dianut oleh satu negara. selanjutnya sistem komunikasi pada dasarnya dipengaruhi oleh ideologi yang dianut oleh negara bersangkutan.

f. Model Perencanaan Komunikasi Jhon Middleton

John Middleton menjelaskan dalam buku Perencanaan dan Strategi Komunikasi milik Canggara: Perencanaan komunikasi adalah proses pengalokasian sumber daya komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya tersebut tidak saja mencakup media massa dan komunikasi antar pribadi, tapi juga setiap aktivitas yang dirancang untuk mengubah perilaku dan menciptakan keterampilan-keterampilan tertentu di antara individu dan kelompok dalam

lingkup tugas-tugas yang dibebankan oleh organisasi (Amir Syarif Hidayat, 2015:67).

Model Perencanaan dan Strategi Komunikasi John Middleton melalui 10 tahapan (Amir Syarif Hidayat, 2015:67).

- a) Pengumpulan data baseline dan need assesment
- b) Perumusan tujuan komunikasi
- c) Analisis perencanaan dan pengembangan strategi
- d) Analisis dan segmentasi khalayak
- e) Pemilihan media
- f) Desain dan pengembangan pesan
- g) Perencanaan manajemen
- h) Pelaksanaan pelatihan
- i) Implementasi
- j) Evaluasi program.

g. Hambatan Komunikasi

Proses komunikasi tidak terlepas dari gangguan atau hambatan yang dapat menyebabkan proses penyampaian pesan tidak berjalan dengan efektif, sehingga pesan yang disampaikan oleh komunikator tidak dapat diterima dengan baik oleh komunikan. Hambatan ini sering ditemui karena masyarakat terdiri dari berbagai macam golongan baik itu dari segi agama, ideologi, dan tingkat pendidikan yang semuanya dapat mengganggu proses komunikasi. Hambatan yang sering terjadi dapat menimbulkan salah pengertian antara komunikator dan komunikan dan

biasa disebut miss communication. Ada empat hambatan yang biasa terjadi dalam proses komunikasi, yaitu (Effendy, 2008:67):

1) Hambatan sosio-antro-psikologis.

Proses komunikasi berlangsung dalam konteks situasional. Ini berarti bahwa komunikator harus memperhatikan situasi ketika komunikasi berlangsung, sebab situasi amat berpengaruh terhadap kelancaran komunikasi terutama situasi yang berhubungan dengan faktor-faktor sosiologi-antropologis-psikologis. Hambatan sosiologis sering ditemui karena masyarakat terdiri dari berbagai golongan dan lapisan, yang menimbulkan perbedaan dan situasi social, agama ideologi, tingkat pendidikan yang dapat menjadi hambatan bagi proses komunikasi. Hambatan antropologis terjadi karena manusia memiliki perbedaan postur, warna kulit dan kebudayaan yang pada hakikatnya berbeda dalam gaya hidup, norma, kebiasaan dan bahasa. selain itu, hambatan psikologis terjadi dalam komunikasi yang disebabkan karena komunikator tidak mengkaji komunikan terlebih dahulu. Komunikasi sulit berhasil apabila sedang sedih, bingung, marah, kecewa, iri hati, jika komunikasi menaruh prasangka kepada komunikator. Prasangka menjadi salah satu hambatan berat bagi kegiatan komunikasi karena orang yang berprasangka bersikap menentang komunikator.

2) Hambatan Semantik

Hambatan sosiologis-antropologis-psikologis terdapat pada pihak komunikan maka hambatan semantik terdapat pada diri komunikator.

Faktor semantik menyangkut bahasa yang dipergunakan komunikator sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaannya kepada komunikan sehingga terjadi kesalahpahaman antara keduanya. demi kelancaran komunikasi maka seorang komunikator harus memperhatikan gangguan semantik sebab salah ucap atau salah tulis dapat menimbulkan salah pengertian atau salah tafsir yang pada akhirnya bisa menimbulkan salah komunikasi.

3) Hambatan Mekanik

Hambatan mekanik adalah gangguan yang disebabkan karena kegaduhan yang bersifat fisik, contohnya adalah gangguan yang dihasilkan dari suara atau bunyi, gambar yang tidak jelas seperti: suara telepon yang krotokan, ketikan huruf yang buran pada surat, suara yang hilang-muncul pada pesawat radio, gambar yang meliuk-liuk pada pesawat televisi, dan lain-lain.

4) Hambatan Ekologis

Hambatan ekologis terjadi disebabkan oleh gangguan lingkungan terhadap proses berlangsungnya komunikasi, jadi datangnya dari lingkungan. Contohnya adalah suara riuh orang-orang atau kebisingan lalu-lintas, suara hujan atau petir, pada saat komunikator sedang menyampaikan pesan

Faktor hambatan yang biasanya terjadi dalam proses komunikasi, dapat dibagi dalam 3 jenis sebagai berikut:

1. Hambatan Teknis Hambatan jenis ini timbul karena lingkungan yang memberikan dampak pencegahan terhadap kelancaran pengiriman dan penerimaan pesan. dari sisi teknologi, keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi, akan semakin berkurang dengan adanya temuan baru dibidang teknologi komunikasi dan sistem informasi, sehingga saluran komunikasi dalam media komunikasi dapat diandalkan serta lebih efisien.
2. Hambatan semantik Gangguan semantik menjadi hambatan dalam proses penyampaian pengertian atau ide secara efektif. defenisi semantik adalah studi atas pengertian yang diungkapkan lewat bahasa, suatu pesan yang kurang jelas. akan tetap menjadi tidak jelas bagaimana baiknya transmisi. untuk menghindari mis-komunikasi semacam ini, seorang komunikator harus memilih kata-kata yang tepat dan sesuai dengan karakteristik komunikannya. Serta melihat dan mempertimbangkan kemungkinan penafsiran yang berbeda terhadap kata-kata yang digunakan.
3. Hambatan Manusiawi Hambatan jelas ini muncul dari masalah-masalah pribadi yang dihadapi oleh orang-orang yang terlibat dalam komunikasi. Menurut Cruden dan Sherman, Hambatan itu mencakup: Hambatan yang bersal dari perbedaan individual manusia, seperti perbedaan persepsi, umur, keadaan emosi, status, keterampilan mendengarkan, pencarian informasi, penyaringan informasi. Hambatan yang ditimbulkan oleh iklim psikologis dalam organisasi

atau lingkungan sosial dan budaya, seperti suasana dan iklim kerja serta tata nilai yang dianut.

7. Sosialisasi

Sosialisasi mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural lingkungan sosial dari masyarakat yang bersangkutan, interaksi sosial dan tingkah laku sosial. berdasarkan hal tersebut, sosialisasi merupakan mata rantai paling penting di antara sistem-sistem sosial lainnya, karena dalam sosialisasi adanya keterlibatan individu-individu sampa dengan kelompok-kelompok dalam satu sistem untuk berpartisipasi.

Pengertian sosialisasi menurut Charles R Wright yang dikutip oleh sutaryo adalah “Proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain”. (Sutaryo, 2004:17).

Sosialisasi merupakan proses belajar, pada dasarnya sifat manusia adalah tidak akan pernah puas untuk belajar sesuatu hal yang belum diketahuinya, seperti belajar norma-norma untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, hal tersebut sejalan dengan pendapat Peter L Berger bahwa sosialisasi merupakan proses dengan mana seseorang belajar menjadi anggota masyarakat. berdasarkan uraian diatas terdapat persamaan mengenai sosialisasi, terletak pada objek dari sosialisasi yaitu masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia, dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Jadi, dalam

sosialisasi terdapat interaksi antara manusia sebagai anggota kelompok. timbulnya kelompok-kelompok dalam masyarakat ialah karena kedua sifat dari manusia yang bertentangan satu sama lain, disitu pihak ingin bekerja sama di pihak lain cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia untuk dapat berkuasa. Kekuasaan merupakan kajian dan konsep dari politik mengenai hubungan sosialisasi. Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya (Sutaryo, 2004:98).

8. Kekerasan

a. Pengertian Kekerasan terhadap perempuan dan anak

Pada prinsipnya kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu fenomena pelanggaran hak asasi manusia, sehingga masalah ini merupakan salah satu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan. Dalam konsep, domestic violence cakupan atas tindakan yang dikategorikan sebagai bentuk kekerasan, lebih pada suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat dalam hubungan interpersonal, yang bisa dilakukan oleh teman dekat, bisa pacar, atasan dengan bawahan, pasangan hidupnya atau antar anggota keluarga baik yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah maupun di luar

perkawinan. Kelompok yang dianggap rentan menjadi korban kekerasan adalah perempuan dan anak, dan kekerasan tersebut dapat terjadi di tempat umum, di tempat kerja, di sekolah, bahkan di lingkungan keluarga atau yang dikenal di Indonesia sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).¹

Pada Pasal 1 Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) , bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah: “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemasaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

b. Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap perempuan dan anak

Bentuk-bentuk KDRT, meliputi: Pertama, kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. kekerasan secara fisik baik dalam bentuk ringan maupun berat. kekerasan fisik dalam bentuk ringan misalnya, mencubit, menjambak, memukul dengan pukulan yang tidak menyebabkan cedera dan sejenisnya. sedangkan kekerasan fisik dalam bentuk berat misalnya, memukul hingga cedera, menganiaya, melukai, membunuh dan sejenisnya. Kedua, kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis pada seseorang. kekerasan psikis

¹ (<http://djpp.depukumham.go.id/hukum>)

tidak tampak bukti yang dapat dilihat secara kasat mata, namun kekerasan psikis sering menimbulkan dampak yang lebih lama. Ketiga, kekerasan seksual yaitu kekerasan yang berbentuk pelecehan seksual seperti ucapan, simbol dan sikap yang mengarah pada porno, perbuatan cabul, perkosaan dan sejenisnya. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu. Keempat, kekerasan ekonomi/ penelantaran rumah tangga yaitu kekerasan dalam bentuk penelantaran ekonomi pada umumnya tidak menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah dan hak-hak ekonomi lainnya terhadap istri, anak atau anggota keluarga lainnya dalam lingkup rumah tangga. karena pada hakikatnya, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Mufidah, 2008: 269- 272).

c. Faktor terjadinya kekerasan

Terjadinya kekerasan terhadap anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor Internal

a. Berasal dalam diri anak. terjadinya kekerasan terhadap anak dapat disebabkan oleh kondisi dan tingkah laku anak. kondisi anak tersebut misalnya : Anak

menderita gangguan perkembangan, ketergantungan anak pada lingkungannya, anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, anak yang memiliki perilaku menyimpang dan tipe kepribadian dari anak itu sendiri.

b. Keluarga / orang tua Faktor orang tua atau keluarga memegang peranan penting terhadap terjadinya kekerasan pada anak. beberapa contoh seperti orang tua yang memiliki pola asuh membesarkan anaknya dengan kekerasan atau penganiayaan, keluarga yang sering bertengkar mempunyai tingkat tindakan kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang tanpa masalah, orang tua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak karena faktor stres yang dialami orang tua tersebut, orang tua atau keluarga belum memiliki kematangan psikologis sehingga melakukan kekerasan terhadap anak, riwayat orang tua dengan kekerasan pada masa kecil juga memungkinkan melakukan kekerasan pada anaknya.

2. Faktor Eksternal

a. Lingkungan luar

Kondisi lingkungan juga dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, diantaranya seperti kondisi lingkungan yang buruk, terdapat sejarah penelantaran anak, dan tingkat kriminalitas yang tinggi dalam lingkungannya.

b. Media massa

Media massa merupakan salah satu alat informasi. Media massa telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari – hari dan media ini tentu mempengaruhi penerimaan konsep, sikap, nilai dan pokok moral. seperti halnya dalam media cetak menyediakan berita – berita tentang kejahatan, kekerasan, pembunuhan.

kemudian media elektronik seperti radio, televisi, video, kaset dan film sangat mempengaruhi perkembangan kejahatan yang menampilkan adegan kekerasan, menayangkan film action dengan perkelahian, acara berita kriminal, penganiayaan, kekerasan bahkan pembunuhan dalam lingkup keluarga. pada hakekatnya media massa memiliki fungsi yang positif, namun kadang dapat menjadi negatif.

c. Budaya

Budaya yang masih menganut praktek – praktek dengan pemikiran bahwa status anak yang dipandang rendah sehingga ketika anak tidak dapat memenuhi harapan orangtua maka anak harus dihukum. bagi anak laki – laki, adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak laki – laki tidak boleh cengeng atau anak laki – laki harus tahan uji. Pemahaman itu mempengaruhi dan membuat orangtua ketika memukul, menendang, atau menindas anak adalah suatu hal yang wajar untuk menjadikan anak sebagai pribadi yang kuat dan tidak boleh lemah.

d. Dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak

Kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan berbagai dampak yang dapat digolongkan menjadi dua yaitu :

1. Dampak Jangka Pendek

Dampak jangka pendek terutama berhubungan dengan masalah fisik, antara lain : memar, lecet, luka bakar, patah tulang, kerusakan organ, robekan selaput dara,

keracunan, gangguan susunan syaraf pusat. di samping itu seringkali terjadi gangguan emosi atau perubahan perilaku seperti pendiam, menangis, menyendiri.

2. Dampak Jangka Panjang

Dampak jangka panjang dapat terjadi pada kekerasan fisik, seksual, maupun emosional.

- a. Dampak Fisik Kecacatan yang dapat mengganggu fungsi tubuh.
- b. Dampak Seksual Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk HIV/AIDS, gangguan/ kerusakan organ reproduksi.
- c. Dampak Emosional Anak yang mengalami kekerasan dapat mengalami depresi, baik ringan, sedang maupun berat.

Pada depresi ringan anak akan menjadi resisten terhadap lingkungan misal anak menjadi lebih pendiam dalam bergaul dengan temannya. anak yang mengalami depresi sedang menjadi lebih menutup diri dengan lingkungan, menghindari dari pergaulan, dan lebih suka menyendiri. Sedangkan pada tahap depresi berat anak yang mengalami kekerasan akan merasa putus asa dalam hidupnya atau merasa hidupnya tidak berguna sehingga mulai muncul keinginan untuk mengakhiri hidupnya, pada tahap depresi berat ini anak dapat melakukan tindakan bunuh diri.

B. Defenisi Operasional

Berikut adalah beberapa defenisi operasional dalam penelitian yang dilakukan:

1. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses-peroses yang penting dari semua fungsi manajemen sebab tanpa perencanaan (planning) fungsi pengorganisasian, pengontrolan maupun pengarahan tidak akan dapat berjalan.
2. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain.
3. Perencanaan Komunikasi adalah upaya membuat rancangan pelaksanaan sebuah bentuk kegiatan komunikasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan di lapangan hingga monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan komunikasi tersebut.
4. kekerasan adalah Suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk melukai seseorang baik secara fisik maupun psikologis. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. itulah sebabnya perbuatan kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga dibutuhkan suatu instrumen hukum nasional tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

C. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil penelitian
1	Perencanaan Komunikasi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dalam Mensosialisasikan Program <i>Smart City</i> Oleh Annisa Citra Triyandra (2017) Jom VISIP Volume 4 No. 2 Oktober 2017 Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan Deskriptif,	Aspek 123 perencanaan sasaran dapat diketahui bahwa dalam analisis khalayak Diskominfo Kota Pekanbaru akan melakukan sosialisasi kepada seluruh dinas yang berada di lingkungan Kota Pekanbaru pada khususnya dan masyarakat Kota Pekanbaru pada umumnya.
2	Perencanaan Komunikasi Pemerintah Kota Payakumbuh dalam Menunjang Pencapaian Payakumbuh Kota Sehat yang Berkelanjutan Oleh Monica Aprilla (2018) JOM FISIP Vol. 5	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan Deskriptif,	Analisis khalayak dapat diketahui bahwa dalam analisis khalayak Pemerintah kota Payakumbuh mengkategorikan semua masyarakat adalah target sasaran utama yang dituju. masyarakat disini terutama masyarakat yang masih sulit dalam menjaga kebersihan. tempat-tempat umum seperti pasar tradisional, tempat pariwisata juga menjadi target utama pemerintah dalam mempromosikan tentang kota sehat yang

	<p>No. 1 April 2018</p> <p>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau</p>		<p>berkelanjutan. Karena kebersihan kesehatan ini berlaku untuk semua masyarakat tanpa terkecuali termasuk kepada semua sektor-sektor umum yang selalu melibatkan keikutsertaan masyarakat setempat. aspek rancangan pesan dapat diketahui pemerintah kota Payakumbuh dalam penyampaian pesannya baik dalam sosialisasi seminar maupun penyuluhannya lebih kepada pesan-pesan yang bersifat informatif dan persuasif yang berupa ajakan agar masyarakat ikut serta dalam mempertahankan kota sehat yang berkelanjutan.</p>
3	<p>Perencanaan Komunikasi Dalam Membentuk Program Kelompok Informasi Masyarakat Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu</p> <p>Oleh Ayu Erlina (2018)</p> <p>JOM FISIP Vol. 5 No. 1 April 2018</p> <p>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan Deskriptif,</p>	<p>Langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu dalam Membentuk Program Kelompok Informasi Masyarakat ini adalah yang pertama melakukan analisis dan riset, hasil dari analisis dan riset yang dilakukan adalah ada empat aspek sebagai dasar pembentukan kelompok informasi masyarakat tersebut. Yang pertama aspek masyarakat, yang kedua aspek wilayah, yang ketiga aspek informasi dan yang terakhir aspek kelembagaan. dari dasar tersebut maka di keluarkannya kebijakan dari Permenkominfo No.08 Tahun 2010 tentang Pengembangan dan</p>

			<p>Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial. Dalam perencanaan program pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan Diskominfo adalah perencanaan sasaran, tujuan, pesan, melakukan sosialisasi dan study banding. Media yang digunakan untuk kegiatan komunikasi adalah media komunikasi tatap muka dan media internet (website, instagram, facebook dan youtube). Dalam Program Kelompok Informasi Masyarakat ini, belum ada bentuk kegiatan evaluasi secara formal yang dilakukan oleh pihak Diskominfo Kabupaten Indragiri Hulu terhadap kegiatan program ini, baik dari sosialisasi maupun evaluasi kepada setiap kegiatan kelompok yang terbentuk. Sejauh ini Diskominfo Kabupaten Indragiri hulu hanya bisa memberi dorongan kepada setiap kelompok yang telah dibentuk. Perencanaan yang dilakukan oleh Diskominfo ini dapat dikatakan kurang maksimal dikarenakan ada beberapa pencapaian yang tidak dapat dilaksanakan.</p>
--	--	--	--

Perbandingan dan Persamaan penelitian terdahulu dan Peneliti sebagai berikut:

1. Annisa Citra Triyandra (2017) dengan penelitian berjudul Perencanaan Komunikasi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota

Pekanbaru dalam Mensosialisasikan Program Smart City. Hasil penelitian menunjukkan dari aspek 123 perencanaan sasaran dapat diketahui bahwa dalam analisis khalayak Diskominfo Kota Pekanbaru akan melakukan sosialisasi kepada seluruh dinas yang berada di lingkungan Kota Pekanbaru pada khususnya dan masyarakat Kota Pekanbaru pada umumnya.

Persamaan penelitian Annisa Citra Triyandra (2017) dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti perencanaan komunikasi. perbedaan penelitian Annisa Citra Triyandra (2017) dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah pada objek penelitian.

2. Monica Aprilla (2018) dengan penelitian berjudul Perencanaan Komunikasi Pemerintah Kota Payakumbuh dalam menunjang Pencapaian Payakumbuh Kota Sehat yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan analisis khalayak dapat diketahui bahwa dalam analisis khalayak Pemerintah kota Payakumbuh mengategorikan semua masyarakat adalah target sasaran utama yang dituju. Masyarakat disini terutama masyarakat yang masih sulit dalam menjaga kebersihan. tempat-tempat umum seperti pasar tradisional, tempat pariwisata juga menjadi target utama pemerintah dalam mempromosikan tentang kota sehat yang berkelanjutan. Karena kebersihan kesehatan ini berlaku untuk semua masyarakat tanpa terkecuali termasuk kepada semua sektor-sektor umum yang selalu melibatkan keikutsertaan masyarakat setempat. aspek rancangan pesan dapat diketahui pemerintah kota Payakumbuh dalam penyampaian pesannya baik dalam sosialisasi seminar maupun penyuluhannya lebih kepada pesan-pesan yang

bersifat informatif dan persuasi yang berupa ajakan agar masyarakat ikut serta dalam mempertahankan kota sehat yang berkelanjutan.

Persamaan penelitian Monica Aprilla (2018) dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti perencanaan komunikasi. perbedaan penelitian Monica Aprilla (2018) dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah pada tujuan penelitian dan cakupan objek penelitian.

3. Ayu Erlina (2018) dengan penelitian berjudul "Perencanaan Komunikasi Dalam Membentuk Program Kelompok Informasi Masyarakat Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu". Hasil penelitian menunjukkan Langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu dalam Membentuk Program Kelompok Informasi Masyarakat ini adalah yang pertama melakukan analisis dan riset, hasil dari analisis dan riset yang dilakukan adalah ada empat aspek sebagai dasar pembentukan kelompok informasi masyarakat tersebut. Yang pertama aspek masyarakat, yang kedua aspek wilayah, yang ketiga aspek informasi dan yang terakhir aspek kelembagaan. dari dasar tersebut maka di keluarkannya kebijakan dari Permenkominfo No.08 Tahun 2010 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial. dalam perencanaan program pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan Diskominfo adalah perencanaan sasaran, tujuan, pesan, melakukan sosialisasi dan study banding. media yang digunakan untuk kegiatan komunikasi adalah media komunikasi tatap muka dan media internet (website, instagram, facebook dan youtube). Dalam Program Kelompok Informasi Masyarakat ini, belum ada bentuk kegiatan evaluasi secara

formal yang dilakukan oleh pihak Diskominfo Kabupaten Indragiri Hulu terhadap kegiatan program ini, baik dari sosialisasi maupun evaluasi kepada setiap kegiatan kelompok yang terbentuk. Sejauh ini Diskominfo Kabupaten Indragiri hulu hanya bisa memberi dorongan kepada setiap kelompok yang telah dibentuk. Perencanaan yang dilakukan oleh Diskominfo ini dapat dikatakan kurang maksimal dikarenakan ada beberapa pencapaian yang tidak dapat dilaksanakan.

Persamaan penelitian Ayu Erlina (2018) dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti perencanaan komunikasi. perbedaan penelitian Ayu Erlina (2018) dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah pada tujuan penelitian dan cakupan objek penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:45). Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak tepatnya di Jl. Dagang No.78 · (0761) 8400350.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Uraian	Jauari				Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan dan penyusunan UP		x	x	x																				
2.	Seminar proposal					x																			
3.	Revisi									x															
4.	Riset													x											
5.	Konsultasi bimbingan skripsi																					x	x		
6.	Ujian komprehensif																							x	x
7.	Pengesahan skripsi																							x	x
8.	Penggandaan serta penyerahan skripsi																								

C. Subjek Dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ini adalah:

- Kepala Bidang Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Bagian Informasi dan Data Dinas pemberdayaan perempuan dan anak
- Seksi Pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak.
- Kepala Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Objek dalam penelitian ini adalah Perencanaan Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Mensosialisasikan Program Mengenai Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Pekanbaru. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling.

D. Teknik Pengumpulan Data

Tahap-tahap pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah cara menghimpun bahan keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan secara sepihak berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Sugiyono, (2018;140) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan

pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu bisa berupa dokumen publik atau dokumen privat. Metode observasi yang meliputi mengenai perencanaan komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Mensosialisasikan Program Mengenai Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Pekanbaru, kuesioner, atau wawancara sering dilengkapi dengan kegiatan penelusuran dokumentasi.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan. Pelaksanaan analisa data menurut miles dan huberman, sebagaimana dikutip oleh sugiyono (2015), mengemukakan bahwa: Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

- 1) Reduksi data (data *reduction*) Reduksi data adalah proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian,

menyederhanakan, mengabstraksikan dan mentransformasikan data mentah yang didapat dari catatan- catatan yang muncul dilapangan”

- 2) Penyajian data (*data display*) Penyajian data adalah pengumpulan data-data atau informasi-informasi dari hasil observasi partisipatif dan wawancara mendalam peneliti yang sudah direduksi
- 3) Verifikasi (Verification) Langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2015:35).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Dagang No. 78 yang saat ini dikepalai oleh ibu Chairani, S.STP, M.si dengan sekretaris bapak H. Zubir, S.Ag, MH. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

2. Visi dan Misi

Visi :

"Kesetaraan dan Keadilan Gender Menuju Pekanbaru Smart City yang Madani "

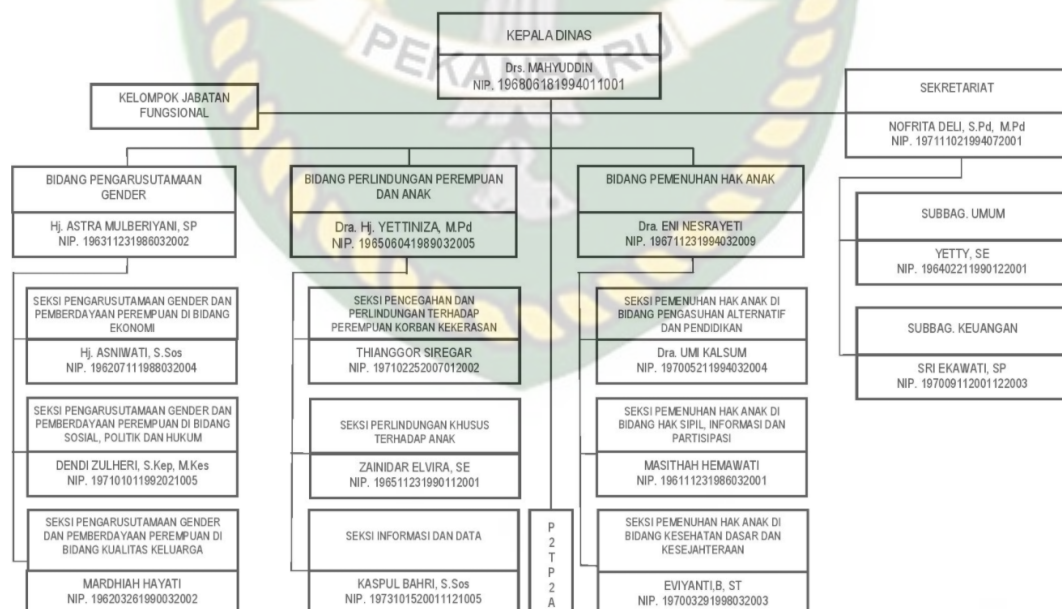
Misi :

1. Mewujudkan pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan
2. Mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak
3. Mewujudkan tata kelola organisasi yang berkualitas

3. Susunan Organisasi

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru



Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengarusutamaan Gender, membawahi :
 1. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi;
 2. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Sosial, Politik dan Hukum;
 3. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Kualitas Keluarga.
- d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi :
 1. Seksi Pencegahan dan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan;
 2. Seksi Perlindungan Khusus Terhadap Anak;
 3. Seksi Informasi dan Data.
- e. Bidang Pemenuhan Hak Anak, membawahi :
 1. Seksi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan;P
 2. Seksi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi;

3. Seksi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.

3. Identitas Informan

Pada Penelitian ini terdapat 5 orang informan yang diwawancarai untuk mengetahui perencanaan komunikasi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam mensosialisasikan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak di kota Pekanbaru. Berikut Identitas Informan Penelitian ini:

- 1) Nama: Dra. Hj. Yettiniza, M.Pd
Tgl Lahir: 12 September 1970
Jabatan di Instansi: Kepala Bidang Perempuan dan Anak
- 2) Nama: Nofrita Deli, S.Pd, M.Pd
Tgl Lahir: 13 Januari 1969
Jabatan di Instansi: Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- 3) Nama: Kaspul Bahri, S.Sos
Tgl Lahir: 27 Desember 1968
Jabatan Instansi: Seksi Informasi dan Data
- 4) Nama: Thianggor Siregar
Tgl Lahir: 20 Juni 1966
Jabatan di Instansi: Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak.
- 5) Nama: Putri Lestari, S.Sos

Tgl Lahir: 17 Febuari 1980

Jabatan di Instansi: Kepala Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

B. Hasil Penelitian

1. Perencanaan Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Mensosialisasikan Program Pencegahan Kekerasan

Pada prinsipnya kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu fenomena pelanggaran hak asasi manusia, sehingga masalah ini merupakan salah satu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan. Dalam konsep *domestic violence* cakupan atas tindakan yang dikategorikan sebagai bentuk kekerasan, lebih pada suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat dalam hubungan interpersonal, yang bisa dilakukan oleh teman dekat, bisa pacar, atasan dengan bawahan, pasangan hidupnya atau antar anggota keluarga baik yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah maupun di luar perkawinan. Kelompok yang dianggap rentan menjadi korban kekerasan adalah perempuan dan anak, dan kekerasan tersebut dapat terjadi di tempat umum, di tempat kerja, di sekolah, bahkan di lingkungan keluarga atau yang dikenal di Indonesia sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Pada prinsipnya, perencanaan komunikasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam mensosialisasikan program pencegahan kekerasan memang harus dikampanyekan secara lantang dengan maksud untuk mengatasi rintangan-rintangan yang ada, guna mencapai efektivitas dari komunikasi itu sendiri. Perencanaan komunikasi memiliki fungsi dan kegunaannya seperti

mengimplementasikan program-program yang ingin dicapai salah satunya mengenai program pencegahan kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak yang ada di Kota Pekanbaru. Peneliti telah melakukan wawancara langsung terhadap informan-informan yang telah ditetapkan sebelumnya guna mencari informasi yang sesuai dengan topik yang sedang dibahas pada penelitian ini yaitu mengenai perencanaan komunikasi dalam hal ini didasarkan dalam model perencanaan komunikasi yang dikembangkan oleh John Middleton yang berisikan tentang 10 tahapan dalam perencanaan komunikasi diantaranya sebagai berikut:

- a) Pengumpulan data baseline dan need assesment
- b) Perumusan tujuan komunikasi
- c) Analisis perencanaan dan pengembangan strategi
- d) Analisis dan segmentasi khalayak
- e) Pemilihan media
- f) Desain dan pengembangan pesan
- g) Perencanaan manajemen
- h) Pelaksanaan pelatihan
- i) Implementasi
- j) Evaluasi program

Kesepuluh konsep perencanaan komunikasi di atas yang menjadi bahan pertimbangan utama bagi peneliti untuk menelaah lebih lanjut mengenai seperti apa perencanaan komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru dalam program pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak-anak. Kemudian, peneliti juga meminta beberapa pendapat

dari informan lainnya dengan meminta ketersediaan oleh narasumber yang pernah atau sedang mengalami kasus kekerasan yang tentunya informasi karakteristik narasumber disamarkan demi kesehatan mentalnya.

Adapun tujuan peneliti melakukan wawancara tambahan dengan pihak-pihak yang pernah mengalami kekerasan ini diharapkan mampu untuk *speak up* atau setidaknya memiliki keinginan dan pertolongan yang diharapkan untuk kedepannya. Untuk lebih jelasnya seperti apa model perencanaan komunikasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru akan dijabarkan sebagai hasil daripada penelitian ini, sebagai berikut.

a. Pengumpulan *Data Baseline* dan *Need Assesment*

Menurut Middleton (dalam Cangara, 2014: 83) menjelaskan bahwa langkah awal dalam perencanaan komunikasi diperlukan seperangkat data dasar (*baseline data*) yang akurat dan memadai termasuk informasi tentang identifikasi masalah dan kajian mengenai apa yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Kegiatan pengumpulan *baseline data* yang dimaksudkan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru melalui hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru, Nofrita Deli:

“Secara konsep pastinya dalam merencanakan program pencegahan kekerasan anak ini kami terlebih dahulu melakukan riset berdasarkan laporan-laporan dari masyarakat yang beredar dengan cara bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menelusuri data dasar yang akurat dan

dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya sehingga kami dapat menentukan kemana langkah selanjutnya. Maksudnya begini, kita akan mencari dasar hukum yang mengacu kepada jenis kekerasan yang dialami oleh korban, dengan mengacu kepada dasar-dasar hukum dan beberapa hasil riset kemudian juga membandingkan bagaimana perlakuan pencegahan di kota-kota lain bahkan di negara-negara lain kemudian mencari titik terang dan mengambil kesimpulan berdasarkan *baseline data* tersebut.” (Hasil Wawancara dengan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru 29 Januari 2021).

Sebagaimana hasil wawancara di atas menyebutkan bahwa dalam merencanakan komunikasi mengenai program perencanaan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Pekanbaru disebutkan bahwa adanya *baseline* atau data-data yang mendasari agar dapat merumuskan untuk regulasi maupun peraturan hingga hukuman yang terkait dengan kekerasan tersebut, yang intinya agar korban dapat diperlakukan dengan sebaik-baiknya dan juga membuat jera bagi pelaku kekerasan. Senada dengan hal tersebut, Kepala Bidang Perempuan dan Perlindungan Anak, Hj, Yettiniza:

“Dalam merencanakan konsep kami selaku Badan Perlindungan Hak Anak tentunya mendata dari segala aspek, terutama dari aspek korbannya, bagaimana modus operandinya misalnya dan lain sebagainya. Tentu saja hal ini kami bandingkan dengan program-program yang ada pada daerah lain dan ini tentunya menjadi suatu penyesuaian yang pelan-pelan akan sama rata dengan daerah yang lainnya. Dengan tujuan yang sama yaitu untuk memberantas pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak” (Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang perempuan dan perlindungan anak Kota Pekanbaru 22 Februari 2021).

Selain untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga wajib menyampaikan aspirasi-aspirasi dari pihak korban. dalam menyusun perencanaan komunikasi yang baik diperlukan hubungan dua arah antara pihak Dinas dengan pihak korban dimana korban juga dapat menentukan lancar atau tidaknya program tersebut. Dalam penyusunan perencanaan komunikasi khususnya pada program Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru sebagaimana yang dikemukakan oleh Cangara (2014:59) yang mengatakan adanya masalah yang perlu dilihat yaitu:

- 1) Regulasi internasional, dalam penyusunan perencanaan komunikasi yang berskala internasional dan nasional, sedapat mungkin memberi perhatian terhadap regulasi atau peraturan-peraturan yang dilakukan secara internasional.
- 2) Kebijakan nasional, penyusunan perencanaan komunikasi juga tidak boleh mengabaikan kebijakan nasional, baik yang tercantum didalam perencanaan pembangunan nasional maupun regulasi atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- 3) Desentralisasi, perencanaan yang berskala nasional umumnya dilakukan secara sentral oleh pemerintah pusat, dan sering menimbulkan rasa enggan untuk mendelegasikan ketinggian daerah.
- 4) Koordinasi, komunikasi dan koordinasi sebagai sumber daya maupun sebagai sarana boleh dikatakan diperlukan hampir disemua level masyarakat. Oleh karena itu didalam pengelolaan diperlukan koordinasi, baik secara vertical antara pusat dan daerah maupun koordinasi horizontal antara kementerian atau departemen yang mengoprasionalkan sumber daya komunikasi.
- 5) Distribusi, sebagai saran yang bisa mendekatkan jarak dan menembus ruang, waktu dan wilayah memerlukan perencanaan dengan memperhatikan kebutuhan.
- 6) Partisipasi dan umpan balik, proses penyebaran informasi tidak boleh berlangsung hanya satu arah (*one way*), tapi diharapkan bisa menumbuhkan partisipasi dalam bentuk umpan

balik dari masyarakat (*two way communication*). Umpan balik diperlukan misalnya untuk mengetahui sampai tidaknya informasi yang disebarakan.

- 7) Riset dan evaluasi, kebutuhan akan hasil penelitian (riset) untuk mengembangkan program komunikasi sangat diperlukan dan menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun perencanaan komunikasi.
- 8) Tenaga dan pelatihan, masalah sumber daya manusia dalam komunikasi memang bisa menjadi krusial jika tidak ditangani oleh hati-hati. Karena bisa muncul persoalan ketidakseimbangan antara sumber daya manusia yang menggerakkan dengan peralatan (infrastruktur) yang tersedia.
- 9) Integritas, perencanaan komunikasi harus mempertimbangkan persoalan integritas, komunikasi dalam hal ini industri media sering kali terseret tanpa disadari oleh alat kapitalis dengan melupakan fungsi-fungsi sosialnya sebagai pengayom masyarakat.
- 10) Pemilihan media, pola pemikiran media sangat bergantung pada sistem komunikasi yang dianut oleh suatu negara.

Kemudian, peneliti melanjutkan kembali wawancara terkait rujukan yang diambil oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam membuat kebijakan atau program tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya di Kota Pekanbaru, Thianggor Siregar:

“Kami juga merujuk kepada WHO yang juga membuat program-program kebijakan terhadap kekerasan pada perempuan dan anak. Ditambah lagi dengan adanya pandemi dimana keadaan serba sulit, pada umumnya kekerasan yang sering dialami oleh masyarakat kelas bawah, setelah dirunut permasalahannya rata-rata karena ekonomi. ditambah lagi di masa yang serba sulit seperti ini tidak heran kalau kekerasan masih saja terjadi dikalangan rumah tangga. maka dari itu, kami telah merujuk beberapa pendapat ahli dari WHO untuk evaluasi program yang akan kami buat kedepannya.” (Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang perempuan dan perlindungan anak tanggal 29 Januari 2021).

Lebih lanjut, Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak, Thianggor Siregar:

“Sebelum mengesahkan peraturan yang akan diterbitkan tersebut, kita ukur diri kita terlebih dahulu apakah mampu untuk meregulasi hal tersebut atau tidaknya. Maka dari itu kita dudukkan terlebih dahulu dengan Permennya, dan disosialisasikan kepada seluruh elemen yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru sehingga mendapatkan keputusan final, maka dari itu kami juga memiliki beragam hasil-hasil studi yang relevan sebelum merencanakan komunikasi tersebut.” (Hasil Wawancara dengan Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak).

Mengenai hal tersebut, dalam rangka menciptakan komunikasi yang diharapkan dapat tersampaikan kepada pihak-pihak terkait terutama kepada masyarakat mengenai pentingnya edukasi tentang program-program yang akan disahkan dan diberlakukan kepada masyarakat di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menyebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru memiliki rujukan terhadap perencanaan komunikasi program masalah kekerasan ini berdasarkan rujukan WHO di masa pandemi ini sebagaimana ada beberapa aspek atau poin penting yang harus direncanakan dalam komunikasi tersebut, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Sertakan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan kekerasan dalam rencana kesiap-siagaan dan penanggulangan pandemi dan dalam komunikasi mitigasi risiko.
- 2) Pastikan program dan pelayanan pencegahan dan penanggulangan untuk mereka yang terdampak kekerasan terus berlanjut selama masa pembatasan dan sesuaikan program dan pelayanan tersebut sebagaimana dibutuhkan.

- 3) Terapkan peraturan dan ketentuan untuk mengurangi risiko-risiko yang berkaitan dengan kekerasan misalnya bahaya penggunaan alkohol, senjata dan atau perilaku ketergantungan obat-obatan.
- 4) Melakukan kampanye-kampanye untuk mengajurkan pengurangan konsumsi alkohol atau zat-zat berbahaya lainnya.

b. Perumusan Tujuan Komunikasi

Dalam menetapkan tujuan program, seorang perencanaan komunikasi harus bisa menjawab pertanyaan: mengapa anda perlu melakukan kegiatan/program dan apa yang ingin anda capai dengan kegiatan tersebut, perubahan bagaimana yang diinginkan, apakah tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan kebutuhan target sasaran (Cangara, 2014:105).

Kekerasan terhadap anak sering diistilahkan dengan perlakuan salah terhadap anak

atau *child abuse*. Menurut Fontana sebagaimana dikutip oleh Goddard, kekerasan terhadap anak atau perlakuan salah (*child abuse*) adalah perlakuan salah terhadap anak secara fisik dan dilakukan oleh orang dewasa yang menimbulkan trauma pada anak bahkan membawa pada kematian. Sedangkan, definisi kekerasan terhadap anak menurut Hasil Konsultasi Anak tentang Kekerasan terhadap Anak di 18 Provinsi dan Nasional adalah suatu tindakan yang menyebabkan kerugian fisik, psikis, maupun seksual.

Berdasarkan beragam permasalahan di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru mengimbau kepada seluruh lapisan

masyarakat agar secara bersama-sama bahu-membahu untuk merumuskan tujuan komunikasi mengenai pencegahan tindakan kekerasan yang terjadi baik di rumah tangga, kekerasan verbal hingga kekerasan seksual yang sering terjadi terhadap anak yang benar-benar harus dicanangkan oleh pihak pemerintah setempat yang saling bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru.

c. Analisis Perencanaan dan Pengembangan Strategi

Tahap ini merupakan keputusan mengenai jalan yang ditempuh dalam mencapai apa yang sudah ditetapkan dalam tujuan program. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap faktor-faktor lingkungan sosial, operasional, dan internal, kemudian dengan mempertimbangkan tujuan, maka ditetapkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut (Cangara, 2014:106).

Perencanaan komunikasi dalam rangka merancang dan melaksanakan program kegiatan komunikasi sangat diperlukan karena pada dasarnya yang menjadi kepentingan dari kegiatan ini adalah “sesuatu yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan dari kegiatan komunikasi, dan tujuan komunikasi ini tentu merupakan suatu kesatuan dengan tujuan dari program pembangunan baik disektor tertentu maupun pembangunan nasional secara keseluruhan. Berikut ini akan dijabarkan beberapa kebijakan teknis yang disusun oleh Kepala Bidang Perempuan dan Perlindungan Anak, Hj.Yettiniza :

- 1) Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak
 - 2) Perumusan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak
 - 3) Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pelaksanaan program kerja bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak
 - 4) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan sistem data gender dan anak
 - 5) Pelaksanaan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup anak di kabupaten
 - 6) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
 - 7) Pelaksanaan analisis, pemanfaatan, penyebarluasan, pendokumentasian dan penyusunan model informasi data terpilah menurut jenis kelamin;
 - 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - 9) Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya (Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Perempuan dan Perlindungan Anak, tanggal 29 Januari 2021).
- Seksi Pemberdayaan Perempuan, mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan gender;
- 3) Melaksanakan kebijakan teknis norma, standart, prosedur dan kriteria program peningkatan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan gender
- 4) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi program kerja peningkatan kualitas hidup perempuan;
- 5) Memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan Pengarus utamaan Gender pada lembaga pemerintahan daerah dan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup anak;
- 6) Melaksanakan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan komunikasi informasi dan edukasi dan pengarus utamaan gender;
- 7) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; dan
- 8) Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya (Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Perempuan dan perlindungan anak tanggal 29 Januari 2021).

d. Analisis dan Segmentasi Khalayak

Analisis dan segmentasi khalayak dimaksudkan agar setiap program yang direncanakan berdasarkan dari kebutuhan khalayak sehingga program yang dilaksanakan akan tepat sasaran. Mengenal khalayak haruslah langkah pertama bagi komunikator dalam usaha komunikasi yang efektif. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam proses komunikasi, khalayak itu sama sekali tidak pasif, melainkan aktif, sehingga antara komunikator dan komunikan bukan saja terjadi saling hubungan, tetapi juga saling mempengaruhi. artinya khalayak dapat dipengaruhi oleh komunikator dan komunikator juga dapat dipengaruhi oleh khalayak.

Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru, mengenal khalayak sangat penting karena khalayaklah yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya sebuah program, sebab seberapa besarpun biaya dan tenaga yang dikeluarkan jika mereka tidak tertarik dengan program yang disosialisasikan, maka kegiatan komunikasi akan sia-sia. Seperti yang di jelaskan oleh Kepala Bidang Perempuan dan Perlindungan Anak, Hj. Yettiniza:

“Untuk mencapai tujuan dilakukannya sosialisasi, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru melakukan pengenalan khalayak terlebih dahulu. Sasaran Khalayak kami yaitu masyarakat umum kota Pekanbaru, Hal ini disebabkan karena khalayak memiliki perbedaan baik dari segi pengetahuan, pengalaman, maupun sosial ekonomi. Jadi, sebisa mungkin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.” (Hasil Wawancara Kepala Bidang Perempuan dan Perlindungan Anak, 29 Januari 2021).

Mengenal khalayak menjadi poin penting dalam strategi komunikasi. Dalam melakukan program komunikasi, Sasaran Khalayak Dinas Pemberdayaan perempuan dan anak yaitu masyarakat umum kota pekanbaru karena Kasus Kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak itu bisa terjadi pada siapapun,

Tanpa melakukan pengenalan terlebih dahulu maka proses sosialisasi tidak akan berjalan efektif. Karena pada dasarnya, khalayak terbagi dalam berbagai lapisan baik dari segi watak dan kepribadian, pengalaman, sosial dan ekonomi.

e. Pemilihan Media

Penggunaan media sebagai alat penyalur, ide dalam rangka merebut pengaruh khalayak adalah suatu hal yang merupakan keharusan, karena media dapat menjangkau khalayak yang cukup besar. Media merupakan alat penyalur, juga mempunyai fungsi sosial yang kompleks. Untuk mencapai sasaran komunikasi kita dapat memilih salah satu atau gabungan dari beberapa media, bergantung pada tujuan yang akan dicapai, pesan yang disampaikan dan teknik yang dipergunakan karena masing-masing medium mempunyai kelemahan tersendiri sebagai alat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru memilih media yang menyesuaikan dengan target yang ingin dicapai. Baik itu media massa seperti Televisi, Koran, Baliho Spanduk, dan Banner maupun media komunikasi secara langsung (seminar, komunikasi kelompok dan diskusi).

“Dalam melakukan sosialisasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru memanfaatkan penggunaan media komunikasi seperti melakukan media kelompok seperti seminar dan Forum Group Discussion, media Massa yaitu Televisi, Baliho, benner, spanduk, dan Media sosial seperti Facebook Instagram dan twitter serta media internet yaitu website. berdasarkan kelebihan dan kekurangan dalam mencapai khalayak.” (Wawancara dengan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Nofrita Deli, 29 Januari 2021)

Demi keberhasilan sosialisasi penggunaan media komunikasi yang tepat mampu membantu penyebaran informasi. Pemanfaatan media komunikasi yang tepat akan berpengaruh besar pada tingkat pengetahuan masyarakat mengenai program pencegahan kekerasan terhadap anak yang diinformasikan. Pemilihan media di sesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Setiap media komunikasi pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan itulah yang menjadi alasan sehingga dipilihlah berbagai jenis media. Media tersebut adalah:

1) Media kelompok

Media komunikasi yang digunakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru dalam mensosialisasikan program mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak adalah media kelompok seminar dan diskusi dengan menggunakan power point. Tujuannya adalah membicarakan mengenai program pencegahan kekerasan terhadap anak dengan menampilkan pembicara, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kelebihan dari media kelompok, diantaranya:

- a) Bahan sosialisasi akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh khalayak
- b) Sosialisasi yang dilakukan akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh komunikator sehingga khalayak tidak mudah bosan
- c) Khalayak lebih banyak melakukan aktivitas mengamati dalam proses sosialisasi

- d) Sosialisasi akan lebih menarik perhatian khalayak sehingga dapat menumbuhkan motivasi dalam diri khalayak.

Media kelompok yang dimaksud oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru yaitu dengan memanfaatkan media visual seperti siaran keliling dengan *Molin* (Mobil Perlindungan) sebutan bagi media yang digunakan dalam mencanangkan program-program yang telah ditetapkan oleh pihak instansi tersebut.

2) Media Massa

Media massa yang digunakan adalah media cetak dan media elektronik. Media cetak terdiri dari surat kabar dan spanduk. Sedangkan media elektronik terdiri dari radio dan televisi. Media masa yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru disini yaitu menggunakan Koran, baliho, spanduk dan banner.

A. Media Cetak

- a) Membuat khalayak berinteraksi dengan aktif berpikir dan mencerna secara reflektif dan kreatif sehingga lebih berpeluang membuka dialog dengan khalayak. Kritik sosial yang disampaikan melalui media cetak akan lebih berobot atau lebih kreatif dibandingkan dengan media elektronik, karena diulas secara lebih mendalam dan bisa merampung sebanyak mungkin opini pengamat serta aspirasi masyarakat.

- b) Dalam hal penyajian, disampaikan secara lebih informatif, lengkap dan spesifik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Yang digunakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, seperti: Koran, Baliho, Pamflet, Spanduk dan Benner.

B. Media Elektronik

- a) Media elektronik ditujukan untuk semua khalayak baik yang bisa membaca maupun yang tidak bisa membaca sehingga pesan yang diterima dari media elektronik lebih kuat pengaruhnya terhadap sikap, perilaku dan tanggapan masyarakat.
- b) Pesan dari media elektronik hanya sekilas sehingga khalayak harus selalu berada didepan media tersebut, sedangkan pesan yang disampaikan melalui media cetak dapat diulang untuk dipelajari serta disimpan untuk dibaca pada setiap kesempatan, seperti yang digunakan dinas pemberdayaan perempuan dan anak Seperti, Televisi

3) Media Sosial/Internet

Media sosial merupakan media yang digunakan untuk proses percakapan yang tidak hanya berlangsung dua arah, lebih dari broadcast satu arah seperti media tradisional, media sosial memiliki keunikan tersendiri yaitu dengan adanya ide tetap terhubung dengan site, sumber dan orang-orang lainnya (Adelia Masrifah cahyani, 2019:39)

Saat ini sudah banyak media sosial yang dapat kita temukan saat kita membuka internet. Untuk hal ini kita perlu mengetahui macam-macam media sosial yang sesuai dengan tujuan kita. Ron Jones mengklasifikasikan jenis media sosial sebagai berikut:

1. Social sharing (Flickr, Snapfish, YouTube, Jumptcut, dan Website). Di dalam social sharing ini kita dapat membuat, meng-upload dan membagikan video serta foto dengan yang lain.
2. Social networks (Facebook, whatsapp, Aplikasi Zoom Meeting, Instagram, LinkedIn, MySpace, dan Twitter) Pada jejaring sosial ini, kita dapat menemukan dan terhubung dengan orang lain. Saat terhubung dengan orang lain, kita dapat terus mengikuti dan melihat aktivitasnya serta dapat mendapatkan informasi dari yang bersangkutan lewat postingannya. Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam melakukan penyampaian informasi kepada masyarakat terkait aktivitas DPPA melalui Media Sosial yaitu Instagram, Facebook, twitter dan website.

Lebih lanjut, pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru melalui Sekretaris Dinasnya menyampaikan bahwa baru-baru ini pihak dinas dengan gencar untuk memanfaatkan penggunaan media sosial. Berhubung dengan adanya pandemi covid-19 maka langkah maksimal dalam memanfaatkan media yang digunakan untuk mensosialisasikan hal tersebut adalah melalui media sosial. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru, Nofrita Deli:

“Saat ini ditengah pandemi seperti ini kami tidak dapat turun kelapangan, maka dari itu kami memanfaatkan dengan maksimal penggunaan *whatsapp* dan aplikasi seperti *Zoom Meeting* dalam mensosialisasikan apa yang selama ini menjadi suatu program dari kami kepada masyarakat di Kota Pekanbaru.” (Hasil Wawancara dengan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru 29 Januari 2021).

Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru memanfaatkan penggunaan media sosial seperti *Whatsapp* dan *Zoom Meeting*. Karena seiring terjadinya pandemi covid-19 maka langkah maksimal dalam memanfaatkan media yang digunakan untuk mensosialisasikan hal tersebut adalah melalui media sosial.

f. Desain dan Pengembangan Pesan

Dalam tahap ini, disusun pesan-pesan yang menysasar pada setiap khalayak yang menjadi target dalam program pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Pekanbaru, yaitu kepada penduduk Kota Pekanbaru itu sendiri dan pihak-pihak lembaga yang ber kaitan lainnya.

Pesan-pesan represif yang dikomunikasikan dalam program ini diharapkan dapat membuat efek jera kepada pelaku kekerasan khususnya kepada perempuan dan anak di Kota Pekanbaru yang semakin hari semakin meresahkan dan terus bertambahnya kasus, karena ketidakpastian hukum yang mengatur khususnya di Kota Pekanbaru, tidak heran karena ketidakjelasan regulasi yang diatur membuat para pelaku semakin merajalela.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Machfoedz (2010:4) bahwa untuk menunjang proses komunikasi yang efektif, pesan yang diciptakan haruslah dapat sampai dengan baik kepada khalayaknya. Pesan yang dibuat ini haruslah pesan

yang bisa mendapat perhatian khalayaknya (*attention*), membangkitkan minat (*interest*),

menimbulkan hasrat (*desire*), dan mendorong tindakan (*action*).

Salah satu desain pengembangan mengenai perang melawan penindasan oleh kaum perempuan dan perlindungan anak salah satunya melalui konsep sosialisasi. Sosialisasi merupakan salah satu fungsi komunikasi yang berperan penting dalam pola tingkah laku seseorang di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan budayanya. Melalui proses sosialisasi, seseorang akan diwarnai cara berpikir dan kebiasaan-kebiasaan hidupnya.

Dengan demikian, tingkah laku seseorang akan dapat diramalkan. Dari keadaan tidak atau belum tersosialisasinya, menjadi manusia masyarakat dan beradab. kesendirian dan kepribadian melalui proses sosialisasi dapat terbentuk, dimana kepribadian itu merupakan suatu komponen penyebab atau pemberi warna dari wujud tingkah laku sosial manusia. Jadi, dalam hal ini sosialisasi diartikan, sebagai proses yang membantu individu melalui belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup dan cara berpikir kelompoknya agar dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya.

Setelah mengenal khalayak, maka langkah selanjutnya dalam perumusan strategi komunikasi adalah menyusun pesan, menentukan tema dan materi yang tepat. dalam penyusunan pesan mengenai program pencegahan kekerasan terhadap anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru menggunakan dua penyajian pesan yaitu, pesan verbal dan pesan non verbal.

Hal ini disebabkan karena tidak semua khalayak memiliki kemampuan yang sama dalam memahami pesan yang telah disampaikan oleh komunikator. Pesan verbal adalah pesan yang disampaikan dalam bentuk simbol maupun bahasa baik itu yang disampaikan secara langsung maupun melalui tulisan. Pesan verbal digunakan pada saat pelayanan, seminar, dan diskusi serta iklan di media elektronik seperti pamflet, spanduk dan banner. Sedangkan pesan non verbal adalah pesan yang dilakukan pada saat sosialisasi secara langsung misalnya, gerak tubuh, mimik, dan gestur dari seorang komunikator. Hal ini dijelaskan melalui salah satu wawancara dengan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru, Nofrita Deli:

“Dengan cara memberikan bimbingan dan pelatihan tatap muka kepada aktivis PATBM baik melalui sosial media seperti *whatsapp* atau *zoom meeting* yang mana bahan-bahan pelatihan berasal dari Kemen PPPA RI yang selanjutnya diimplementasikan langsung oleh aktivis PATBM kepada masyarakat secara langsung”. (Hasil Wawancara dengan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru 29 Januari 2021).

Dalam membuat materi pesan, tentu saja yang harus diperhatikan adalah membuat materi yang menarik dan sesuai dengan media yang digunakan. Jika sosialisasinya dilakukan secara tatap muka materi pesannya pun harus sesuai dengan kebutuhan khalayak. Sedangkan jika sosialisasinya melalui media massa maka pesannya bersifat umum seperti melalui pesan *whatsapp* atau melalui *video call* di aplikasi *zoom meeting*.

g. Perencanaan Manajemen

Dalam tahap ini dilakukan pemilihan komunikator yang akan menyampaikan pesan komunikasi kepada khalayak yang dituju, baik itu dalam

bentuk komunikator perseorangan ataupun dalam bentuk tim komunikator. Menurut Cangara (2014:133) ada 3 syarat yang perlu dipenuhi oleh seorang komunikator, yakni tingkat kepercayaan orang lain kepada dirinya (*credibility*), daya tarik (*attractiveness*) dan kekuatan (*power*).

Langkah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru yang dilakukan dalam perumusan strategi adalah menetapkan metode. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam menyampaikan pesan yaitu, berdasarkan pelaksanaannya: metode pengulangan dan canalizing (mendalam) dan berdasarkan isinya: metode informatif, persuasif, edukatif, dan kursif. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Perempuan dan Perlindungan Anak, Hj. Yettiniza:

“Jadi, saat melakukan sosialisasi kami menggunakan metode informatif yaitu menjelaskan kepada khalayak apa itu kekerasan terhadap anak, dan bagaimana bentuk dari kekerasan terhadap anak. Kedua, metode edukatif yaitu memberikan pemahaman dan pengajaran kepada khalayak. Dan yang terakhir menggunakan metode persuasif, yaitu mengajak dan mempengaruhi khalayak agar ikut serta dalam perlindungan anak”. (Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Perempuan dan perlindungan Anak tanggal 29 Januari 2021).

Metode tersebut diterapkan pada saat melakukan sosialisasi kepada khalayak dalam menyampaikan pesan. Akan tetapi, penyampaian pesan ini lebih bersifat persuasif yang mengedepankan perubahan sikap dari khalayak sebelum dan setelah menerima pesan.

Pemerintah bersama masyarakat, media massa, termasuk kelompok anak melakukan berbagai upaya dalam membangun pemahaman yang memperhatikan kepentingan terbaik anak, dengan memastikan bahwa:

1. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
3. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain,
4. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
5. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak.

Berdasarkan kelima poin di atas, maka pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru bersama-sama dengan PATBM Kota Pekanbaru melakukan perencanaan manajemen mengenai hal-hal apa saja yang penting dan menjadi *concern* bagi mereka dalam mensosialisasikan komunikasi perencanaan terkait dengan program pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak khususnya di Kota Pekanbaru.

h. Pelaksanaan Pelatihan

Layanan pendampingan merupakan kegiatan pendampingan yang diberikan oleh tim Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru setelah korban Kekerasan Perempuan dan Anak melaporkan diri, adapun kegiatan tersebut dijelaskan oleh Kepala Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Putri Lestari:

Gambar 4.2 Fasilitas Pelayanan dan pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (31th) untuk melakukan visum di rumah sakit bhayangkara



Sumber Data: DPPA Pekanbaru

i. Pengobatan Medis

Tujuan dari pengobatan ini adalah agar lebih fokus pada pemulihan kesehatan. Pengobatan ini ditujukan untuk korban KDRT yang mengalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Korban KDRT dirujuk ke RSUD setempat, jika korban mengalami luka yang serius, maka dirujuk lebih lanjut.

ii. Pelaporan ke Kepolisian Sampai Proses Peradilan

Tujuan dari pendampingan ini adalah memfasilitasi korban jika kasus yang sedang dialaminya ingin diproses secara hukum. Dalam hal ini korban akan didampingi oleh (lembaga bantuan hukum) LBH. Untuk keperluan barang bukti, korban di visum terlebih dahulu oleh petugas ahli yang didampingi oleh pendamping. Layanan ini merupakan salah satu bentuk advokasi litigasi.

iii. Bimbingan Psikologi

Rehabilitasi diberikan jika korban kekerasan Perempuan dan Anak mengalami gangguan psikologi akibat kekerasan yang dialaminya seperti rasa takut, trauma, hilang kepercayaan diri, serta hal-hal yang lain yang menyebabkan korban tidak berdaya secara mental. Dalam hal ini, pelaksanaan rehabilitasi dilakukan oleh tenaga ahli psikologi. Rehabilitasi dilakukan dengan melakukan dialog antara korban dengan ahli psikolog/psikiater yang terdapat di shelter. Bimbingan tersebut diberikan ketika korban dirasa memerlukannya dengan melihat perilaku yang ditampilkan dalam bergaul selama di shelter.

iv. Perlindungan di Shelter

Setiap korban KDRT yang melaporkan diri serta merasa keamanannya tidak terjamin, maka korban untuk sementara berada di shelter. Di dalam shelter kerahasiaan korban akan terjaga, karena keberadaan shelter dirahasiakan serta penjagaan yang cukup ketat karena setiap tamu yang datang harus menuliskan identitas diri serta mencantumkan keperluannya. Shelter merupakan tempat aman sementara bagi korban kekerasan. Korban yang masih terguncang atau mengalami stres memerlukan waktu untuk menenangkan diri. Di shelter tersebut kenyamanan korban benar-benar dibuat nyaman karena semua fasilitas dapat terpenuhi seperti kamar tidur yang cukup, dapur, ruang konseling. Di dalam shelter juga tersedia tenaga profesional dibidang dan tugasnya seperti dokter, psikolog, pekerja sosial dan tenaga-tenaga yang lain yang dapat membantu menambah kemampuan dan keterampilan korban. di dalam shelter tersebut terdapat ibu panti yang mengawasi selama 24 jam. Ibu panti yang siap memberikan pertolongan pada korban.

v. Mediasi / Advokasi Nonlitigasi

4. Mediasi dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki keluarga yang mengalami KDRT untuk dapat kembali harmonis untuk dapat menerima dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Mediasi ini dilakukan dengan prinsip pembelajaran orang dewasa di mana mediator hanya memberikan masukan-masukan solusi untuk masalah yang ada dan keputusan terakhir diserahkan sepenuhnya pada klien". (Hasil Wawancara

dengan kepala Unit Pelayanan Terpadu Dinas Pemberdayaan perempuan dan anak 29 januari 2021).

Mengenai pelaksanaan pelatihan, dalam hal ini strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru melakukan kegiatan layanan pendampingan sebagai bantuan hukum kepada korban melalui kesepakatan korban dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang ditunjuk dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru, untuk perincian kegiatan pelaksanaan pelatihan mengenai layanan pendampingan.

i. Implementasi

Tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru untuk mengimplementasikan program pencegahan kekerasan tersebut adalah dengan cara mengimplementasikan strategi tersebut yang telah direncanakan untuk kemudian diterapkan baik kepada pelaku maupun kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di Kota Pekanbaru.

Dalam melakukan upaya penghapusan maupun pencegahan terhadap kasus tersebut, terdapat beberapa upaya yang digunakan oleh dinas yang dibantu oleh unit pelaksana teknis untuk mengatasinya yaitu dengan adanya layanan pengaduan, pelayanan medis, pelayanan psikologis dan rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, penegakan dan reintegrasi sosial. Layanan-layanan tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dengan beberapa instansi terkait yang dimana layanan tersebut dilaksanakan pula sesuai dengan kebutuhan para

korban sehingga tidak dilaksanakan secara keseluruhan karena kebutuhan para korban yang berbeda-beda. Seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Nofrita Deli:

“Penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Pekanbaru terdiri dari empat bagian yaitu program pencegahan dari tindak kekerasan, perlindungan hukum, pemulihan, dan koordinasi. Adapun pelaksanaan dari program-program tersebut dijelaskan sebagai berikut: Program pencegahan tindak kekerasan, yaitu sosialisasi sistem perlindungan perempuan, dan bimbingan teknik kepada masyarakat.” (Hasil Wawancara dengan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak 29 Januari 2021).

Pencegahan dari tindak kekerasan sendiri merupakan bentuk awal dari suatu pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru yang bertujuan mencegah

berkembangnya dan meluasnya jumlah permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Kota Pekanbaru. dalam pelaksanaan pencegahan ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan kerja sama dengan beberapa instansi lainnya di Kota Pekanbaru seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Kepolisian, Akademisi, Pengacara, LSM, masyarakat dan instansi-instansi lainnya.

Program Perlindungan Hukum, yaitu konsultasi penanganan kasus, advokasi penanganan kasus. Perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh dinas untuk dapat memberikan tempat atau wadah bagi para korban akibat kekerasan yang dialaminya khususnya perempuan dan memperoleh rasa aman. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Dinas yakni berupa rumah aman (shelter) yang merupakan rumah singgah sementara bagi korban, rumah

duta revolusi mental (RDRM) yang merupakan rumah untuk pemulihan kondisi psikis korban, serta layanan konseling yang dilakukan oleh para psikolog.

j. Evaluasi Program

Menurut Cangara (2014:174) mengemukakan bahwa evaluasi merupakan metode pengkajian dan penilaian keberhasilan kegiatan komunikasi yang telah dilakukan, dengan tujuan memperbaiki atau meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai sebelumnya. Evaluasi dilakukan dalam rangka mengukur sejauh mana keberhasilan suatu program komunikasi. Seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak, Nofrita Deli:

“Dalam upaya melakukan pelaksanaan program perlindungan Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan “Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru mengalami kendala dalam pelaksanaan program tersebut sehingga belum memberikan dampak yang signifikan. pelaksanaan program masih terhambat oleh beberapa hal seperti kurangnya komitmen dan komunikasi antar anggota, kurangnya ketersediaan sumber daya baik manusia, keuangan maupun fasilitas”
(Hasil wawancara Oleh sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak 29 januari 2021).

Tabel 4.1

Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru

No	Bidang	Nama Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator
1.	Penguatan Jaringan dan Kelembagaan	Sosialisasi keberadaan P2TP2A Kota Pekanbaru	Melakukan seminar, penyuluhan, sosialisasi kelompok dan workshop	Kelompok masyarakat, ormas perempuan, pelajar dan santri se-	Masyarakat umum dapat mengetahui keberadaan P2TP2A Kota Pekanbaru

				Kota Pekanbaru	Masyarakat mengerti tentang fungsi P2TP2A Kota Pekanbaru Masyarakat tahu akan proses hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga
2.	Pendampingan dan Advokasi	Pendampingan hukum dan pemulihan	Pembentukan Forum Anak P2TP2A (hari anak) Memberikan layanan pendampingan di pengadilan agama Pendampingan di kepolisian Pendampingan di kejaksaan	Perempuan dan anak-anak korban kekerasan Korban KDRT	Terumuskannya pola koordinasi ditingkat kecamatan terkait perlindungan perempuan dan anak Korban merasa aman karena merasa didampingi
3.	Pendataan dan Pelaporan	Pelayanan pengaduan Perumusan prosedur pengaduan yang berspektif korban	Menerima pengaduan Kajian rutin		Terlayannya pengaduan korban kekerasan prosedur pengaduan yang mudah dijangkau

Sumber Data: DPPA Pekanbaru, 2020

2. Hasil Perencanaan Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Mensosialisasikan Program Pencegahan Kekerasan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap responden yang ditetapkan pada penelitian ini, maka selanjutnya akan ditarik kesimpulan mengenai hasil perencanaan komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru dalam mensosialisasikan Program Pencegahan Kekerasan yang dapat disajikan pada bagan berikut:



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

perencanaan manajemen, pelaksanaan pelatihan, implementasi dan evaluasi program.

1. Pengumpulan *Data Baseline* dan *Need Assesment*

Kegiatan pengumpulan *baseline data* yang dimaksudkan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru yaitu dalam merencanakan komunikasi mengenai program perencanaan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Pekanbaru disebutkan bahwa adanya *baseline* atau data-data yang mendasari agar dapat merumuskan untuk regulasi maupun peraturan hingga hukuman yang terkait dengan kekerasan tersebut, yang intinya agar korban dapat diperlakukan dengan sebaik-baiknya dan juga membuat jera bagi pelaku kekerasan. Selain untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga wajib menyampaikan aspirasi-aspirasi dari pihak korban. dalam menyusun perencanaan komunikasi yang baik diperlukan hubungan dua arah antara pihak Dinas dengan pihak korban dimana korban juga dapat menentukan lancar atau tidaknya program tersebut Berdasarkan hasil wawancara di atas menyebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru memiliki rujukan terhadap perencanaan komunikasi program masalah kekerasan ini berdasarkan rujukan WHO di masa pandemi ini sebagaimana ada beberapa aspek atau poin penting yang harus direncanakan dalam komunikasi tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. Sertakan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan kekerasan dalam rencana kesiap-siagaan dan penaggulangan pandemi dan dalam komunikasi mitigasi risiko.

2. Pastikan program dan pelayanan pencegahan dan penanggulangan untuk mereka yang terdampak kekerasan terus berlanjut selama masa pembatasan dan sesuaikan program dan pelayanan tersebut sebagaimana dibutuhkan.
3. Peraturan dan ketentuan untuk mengurangi risiko-risiko yang berkaitan dengan kekerasan misalnya bahaya penggunaan alkohol, senjata dan atau perilaku ketergantungan obat-obatan.
4. Melakukan kampanye-kampanye untuk mengajurkan pengurangan konsumsi alkohol atau zat-zat berbahaya lainnya.

2. Perumusan Tujuan Komunikasi

Dalam menetapkan tujuan program, seorang perencanaan komunikasi harus bisa menjawab pertanyaan: mengapa anda perlu melakukan kegiatan/ program dan apa yang ingin anda capai dengan kegiatan tersebut, perubahan bagaimana yang diinginkan, apakah tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan kebutuhan target sasaran (Cangara, 2014:105).

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar secara bersama-sama bahu-membahu untuk merumuskan tujuan komunikasi mengenai pencegahan tindakan kekerasan yang terjadi baik di rumah tangga, kekerasan verbal hingga kekerasan seksual yang sering terjadi pada anak yang benar-benar harus dicanangkan oleh pihak pemerintah setempat yang saling bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru.

3. Analisis Perencanaan dan Pengembangan Strategi

Perencanaan komunikasi dalam rangka merancang dan melaksanakan program kegiatan komunikasi sangat diperlukan karena pada dasarnya yang menjadi kepentingan dari kegiatan ini adalah “sesuatu yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan dari kegiatan komunikasi, dan tujuan komunikasi ini tentu merupakan suatu kesatuan dengan tujuan dari program pembangunan baik disektor tertentu maupun pembangunan nasional secara keseluruhan. Berikut ini akan dijabarkan beberapa kebijakan teknis yang disusun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak
- b. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak
- c. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pelaksanaan program kerja bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak
- d. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaran sistem data gender dan anak

- e. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup anak di kabupaten
- f. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
- g. Pelaksanaan analisis, pemanfaatan, penyebarluasan, pendokumentasian dan penyusunan model informasi data terpilah menurut jenis kelamin;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

Seksi Pemberdayaan Perempuan, mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan gender;

- 3) Melaksanakan kebijakan teknis norma, standart, prosedur dan kriteria program peningkatan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan gender
- 4) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi program kerja peningkatan kualitas hidup perempuan;
- 5) Memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan Pengarus utamaan Gender pada lembaga pemerintahan daerah dan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup anak;
- 6) Melaksanakan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan komunikasi informasi dan edukasi dan pengarus utamaan gender;
- 7) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; dan
- 8) Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya

4. Analisis dan Segmentasi Khalayak

Analisis dan segmentasi khalayak dimaksudkan agar setiap program yang direncanakan berdasarkan dari kebutuhan khalayak sehingga program yang dilaksanakan akan tepat sasaran. Mengenal khalayak yang dilakukan pihak Dinas Pemberdayaan perempuan dan anak haruslah langkah pertama bagi komunikator dalam usaha komunikasi yang seefektif mungkin. Sebagaimana telah dijelaskan

bahwa dalam proses komunikasi, khalayak itu sama sekali tidak passif, melainkan aktif, sehingga antara komunikator dan komunikan bukan saja terjadi saling hubungan, tetapi juga saling mempengaruhi. artinya khalayak dapat dipengaruhi oleh komunikator dan komunikator juga dapat dipengaruhi oleh khalayak. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru, mengenal khalayak sangat penting karena khalayaklah yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya sebuah program, sebab seberapa besarpun biaya dan tenaga yang dikeluarkan jika mereka tidak tertarik dengan program yang disosialisasikan, maka kegiatan komunikasi akan sia-sia. Mengetahui khalayak menjadi poin penting dalam strategi komunikasi. Dalam melakukan program komunikasi, Sasaran Khalayak Dinas Pemberdayaan perempuan dan anak yaitu masyarakat umum kota pekanbaru karena Kasus Kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak itu bisa terjadi pada siapapun, Tanpa melakukan pengenalan terlebih dahulu maka proses sosialisasi tidak akan berjalan efektif. Karena pada dasarnya, khalayak terbagi dalam berbagai lapisan baik dari segi watak dan kepribadian, pengalaman, sosial dan ekonomi.

5. Pemilihan Media

Demi keberhasilan sosialisasi penggunaan media komunikasi yang tepat mampu membantu penyebaran informasi. Pemanfaatan media komunikasi yang tepat akan berpengaruh besar pada tingkat pengetahuan masyarakat mengenai program pencegahan kekerasan terhadap anak yang diinformasikan. Pemilihan media di sesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Setiap media komunikasi pasti

memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan itulah yang menjadi alasan sehingga dipilihlah berbagai jenis media. Media tersebut adalah:

1. Media kelompok

Media komunikasi yang digunakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru dalam mensosialisasikan program mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak adalah media kelompok seminar dan diskusi dengan menggunakan power point. Tujuannya adalah membicarakan mengenai program pencegahan kekerasan terhadap anak dengan menampilkan pembicara, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kelebihan dari media kelompok, diantaranya:

- a) Bahan sosialisasi akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh khalayak
- b) Sosialisasi yang dilakukan akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh komunikator sehingga khalayak tidak mudah bosan
- c) Khalayak lebih banyak melakukan aktivitas mengamati dalam proses sosialisasi
- d) Sosialisasi akan lebih menarik perhatian khalayak sehingga dapat menumbuhkan motivasi dalam diri khalayak.

Media kelompok yang dimaksud oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru yaitu dengan memanfaatkan media visual seperti siaran keliling dengan *Molin* (Mobil Perlindungan) sebutan bagi

media yang digunakan dalam mencanangkan program-program yang telah ditetapkan oleh pihak instansi tersebut.

2. Media Massa

Media massa yang digunakan adalah media cetak dan media elektronik. Media cetak terdiri dari surat kabar dan spanduk. Sedangkan media elektronik terdiri dari radio dan televisi. Media masa yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru disini yaitu menggunakan Koran, baliho, spanduk dan banner.

A. Media Cetak

- a) Membuat khalayak berinteraksi dengan aktif berpikir dan mencerna secara reflektif dan kreatif sehingga lebih berpeluang membuka dialog dengan khalayak. Kritik sosial yang disampaikan melalui media cetak akan lebih berobot atau lebih kreatif dibandingkan dengan media elektronik, karena diulas secara lebih mendalam dan bisa merampung sebanyak mungkin opini pengamat serta aspirasi masyarakat.
- b) Dalam hal penyajian, disampaikan secara lebih informatif, lengkap dan spesifik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Yang Digunakan oleh Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak seperti, Koran, Baliho, Spanduk dan Benner.

B. Media Elektronik

- c) Media elektronik ditujukan untuk semua khalayak baik yang bisa membaca maupun yang tidak bisa membaca sehingga pesan yang diterima dari media elektronik lebih kuat pengaruhnya terhadap sikap, perilaku dan tanggapan masyarakat.
- c) Pesan dari media elektronik hanya sekilas sehingga khalayak harus selalu berada didepan media tersebut, sedangkan pesan yang disampaikan melalui media cetak dapat diulang untuk dipelajari serta disimpan untuk dibaca pada setiap kesempatan, yang Digunakan oleh Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Seperti, Televisi.

3. Media Sosial/Internet

Media sosial merupakan media yang digunakan untuk proses percakapan yang tidak hanya berlangsung dua arah, lebih dari broadcast satu arah seperti media tradisional, media sosial memiliki keunikan tersendiri yaitu dengan adanya ide tetap terhubung dengan site, sumber dan orang-orang lainnya (Adelia Masrifah cahyani, 2019:39).

Saat ini sudah banyak media sosial yang dapat kita temui saat kita membuka internet. Untuk hal ini kita perlu mengetahui macam-macam media sosial yang sesuai dengan tujuan kita. Ron Jones mengklasifikasikan jenis media sosial sebagai berikut:

1. Social sharing (Flickr, Snapfish, YouTube, Jumpcut, dan Website). Di dalam social sharing ini kita dapat membuat, meng-upload dan membagikan video serta foto dengan yang lain.

2. Social networks (Facebook, whatsapp, Aplikasi Zoom Meeting, Instagram, LinkedIn, MySpace, dan Twitter) Pada jejaring sosial ini, kita dapat menemukan dan terhubung dengan orang lain. Saat terhubung dengan orang lain, kita dapat terus mengikuti dan melihat aktivitasnya serta dapat mendapatkan informasi dari yang bersangkutan lewat postingannya. Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam melakukan penyampaian informasi kepada masyarakat terkait aktivitas DPPA melalui Media Sosial yaitu Instagram, Facebook, twitter dan website.

Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru juga memanfaatkan penggunaan media sosial seperti Whatsapp dan Zoom Meeting. Karena seiring terjadinya pandemi covid-19 maka langkah maksimal dalam memanfaatkan media yang digunakan untuk mensosialisasikan hal tersebut adalah melalui media sosial.

6. Desain dan Pengembangan Pesan

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Machfoedz (2010:4) bahwa untuk menunjang proses komunikasi yang efektif, pesan yang diciptakan haruslah dapat

sampai dengan baik kepada khalayaknya. Pesan yang dibuat ini haruslah pesan yang bisa mendapat perhatian khalayaknya (*attention*), membangkitkan minat (*interest*),

menimbulkan hasrat (*desire*), dan mendorong tindakan (*action*).

Salah satu desain pengembangan mengenai perang melawan penindasan oleh kaum perempuan dan perlindungan anak salah satunya melalui konsep sosialisasi. Sosialisasi merupakan salah satu fungsi komunikasi yang berperan penting dalam pola tingkah laku seseorang di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan budayanya. Melalui proses sosialisasi, seseorang akan diwarnai cara berpikir dan kebiasaan-kebiasaan hidupnya.

Dengan demikian, tingkah laku seseorang akan dapat diramalkan. Dari keadaan tidak atau belum tersosialisasinya, menjadi manusia masyarakat dan beradab. kesendirian dan kepribadian melalui proses sosialisasi dapat terbentuk, dimana kepribadian itu merupakan suatu komponen penyebab atau pemberi warna dari wujud tingkah laku sosial manusia. Jadi, dalam hal ini sosialisasi diartikan, sebagai proses yang membantu individu melalui belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup dan cara berpikir kelompoknya agar dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya.

Setelah mengenal khalayak, maka langkah selanjutnya dalam perumusan strategi komunikasi adalah menyusun pesan, menentukan tema dan materi yang tepat. dalam penyusunan pesan mengenai program pencegahan kekerasan terhadap anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru menggunakan dua penyajian pesan yaitu, pesan verbal dan pesan non verbal.

Hal ini disebabkan karena tidak semua khalayak memiliki kemampuan yang sama dalam memahami pesan yang telah disampaikan oleh komunikator. Pesan verbal adalah pesan yang disampaikan dalam bentuk simbol maupun bahasa baik itu yang disampaikan secara langsung maupun melalui tulisan. Pesan verbal digunakan pada saat pelayanan, seminar, dan diskusi serta iklan di media elektronik seperti pamflet, spanduk dan banner. Sedangkan pesan non verbal adalah pesan yang dilakukan pada saat sosialisasi secara langsung misalnya, gerak tubuh, mimik, dan gestur dari seorang komunikator. Dalam membuat materi pesan, tentu saja yang harus diperhatikan adalah membuat materi yang menarik dan sesuai dengan media yang digunakan. Jika sosialisasinya dilakukan secara tatap muka materi pesannya pun harus sesuai dengan kebutuhan khalayak. Sedangkan jika sosialisasinya melalui media massa maka pesannya bersifat umum seperti melalui pesan *whatsapp* atau melalui *video call* di aplikasi *zoom meeting*.

7. Perencanaan Manajemen

Metode tersebut diterapkan pada saat melakukan sosialisasi kepada khalayak dalam menyampaikan pesan. Akan tetapi, penyampaian pesan ini lebih bersifat persuasif yang mengedepankan perubahan sikap dari khalayak sebelum dan setelah menerima pesan. Dalam tahap ini dilakukan pemilihan komunikator yang akan menyampaikan pesan komunikasi kepada khalayak yang dituju, baik itu dalam bentuk komunikator perseorangan ataupun dalam bentuk tim komunikator. Menurut Cangara (2014:133) ada 3 syarat yang perlu dipenuhi oleh seorang

komunikator, yakni tingkat kepercayaan orang lain kepada dirinya (*credibility*), daya tarik (*attractiveness*) dan kekuatan (*power*).

Langkah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru yang dilakukan dalam perumusan strategi adalah menetapkan metode. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam menyampaikan pesan yaitu, berdasarkan pelaksanaannya: metode pengulangan dan canalizing (mendalam) dan berdasarkan isinya: metode informatif, persuasif, edukatif, dan kursif.

Pemerintah bersama masyarakat, media massa, termasuk kelompok anak melakukan berbagai upaya dalam membangun pemahaman yang memperhatikan kepentingan terbaik anak, dengan memastikan bahwa:

1. Perempuan dan Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik dalam kasus Perempuan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), psikis, kejahatan seksual yang dialami oleh anak, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
3. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain,
4. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

5. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak.

Berdasarkan kelima poin di atas, maka pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru bersama-sama dengan PATBM Kota Pekanbaru melakukan perencanaan manajemen mengenai hal-hal apa saja yang penting dan menjadi *concern* bagi mereka dalam mensosialisasikan komunikasi perencanaan terkait dengan program pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak khususnya di Kota Pekanbaru.

8. Pelaksanaan Pelatihan

Layanan pendampingan merupakan kegiatan pendampingan yang diberikan oleh tim Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru setelah korban Kekerasan Perempuan dan Anak melaporkan diri, adapun kegiatan tersebut meliputi:

- **Pengobatan Medis**

Tujuan dari pengobatan ini adalah agar lebih fokus pada pemulihan kesehatan. Pengobatan ini ditujukan untuk korban KDRT yang mengalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Korban KDRT dirujuk ke RSUD setempat, jika korban mengalami luka yang serius, maka dirujuk lebih lanjut.

- **Pelaporan ke Kepolisian Sampai Proses Peradilan**

Tujuan dari pendampingan ini adalah memfasilitasi korban jika kasus yang sedang dialaminya ingin diproses secara hukum. Dalam hal ini korban akan didampingi oleh (lembaga bantuan hukum) LBH. Untuk keperluan barang bukti, korban di visum terlebih dahulu oleh petugas ahli yang didampingi oleh pendamping. Layanan ini merupakan salah satu bentuk advokasi litigasi.

- **Bimbingan Psikologi**

Rehabilitasi diberikan jika korban kekerasan Perempuan dan Anak mengalami gangguan psikologi akibat kekerasan yang dialaminya seperti rasa takut, trauma, hilang kepercayaan diri, serta hal-hal yang lain yang menyebabkan korban tidak berdaya secara mental. Dalam hal ini, pelaksanaan rehabilitasi dilakukan oleh tenaga ahli psikologi. Rehabilitasi dilakukan dengan melakukan dialog antara korban dengan ahli psikolog/psikiater yang terdapat di shelter. Bimbingan tersebut diberikan ketika korban dirasa memerlukannya dengan melihat perilaku yang ditampilkan dalam bergaul selama di shelter.

- **Perlindungan di Shelter**

Setiap korban KDRT yang melaporkan diri serta merasa keamanannya tidak terjamin, maka korban untuk sementara berada di shelter. Di dalam shelter kerahasiaan korban akan terjaga, karena keberadaan shelter dirahasiakan serta penjagaan yang cukup ketat karena setiap tamu yang

datang harus menuliskan identitas diri serta mencantumkan keperluannya. Shelter merupakan tempat aman sementara bagi korban kekerasan. Korban yang masih terganggu atau mengalami stres memerlukan waktu untuk menenangkan diri. Di shelter tersebut kenyamanan korban benar-benar dibuat nyaman karena semua fasilitas dapat terpenuhi seperti kamar tidur yang cukup, dapur, ruang konseling. Di dalam shelter juga tersedia tenaga profesional dibidang dan tugasnya seperti dokter, psikolog, pekerja sosial dan tenaga-tenaga yang lain yang dapat membantu menambah kemampuan dan keterampilan korban. di dalam shelter tersebut terdapat ibu panti yang mengawasi selama 24 jam. Ibu panti yang siap memberikan pertolongan pada korban.

- **Mediasi / Advokasi Nonlitigasi**

Mediasi dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki keluarga yang mengalami KDRT untuk dapat kembali harmonis untuk dapat menerima dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Mediasi ini dilakukan dengan prinsip pembelajaran orang dewasa di mana mediator hanya memberikan masukan-masukan solusi untuk masalah yang ada dan keputusan terakhir diserahkan sepenuhnya pada klien.

Mengenai pelaksanaan pelatihan, dalam hal ini strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru melakukan kegiatan layanan pendampingan sebagai bantuan hukum kepada korban melalui kesepakatan korban dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang ditunjuk dibawah naungan Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru, untuk perincian kegiatan pelaksanaan pelatihan mengenai layanan pendampingan.

9. Implementasi

Tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru untuk mengimplementasikan program pencegahan kekerasan tersebut adalah dengan cara mengimplementasikan strategi tersebut yang telah direncanakan untuk kemudian diterapkan baik kepada pelaku maupun kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di Kota Pekanbaru. Dalam melakukan upaya penghapusan maupun pencegahan terhadap kasus tersebut, terdapat beberapa upaya yang digunakan oleh dinas yang dibantu oleh unit pelaksana teknis untuk mengatasinya yaitu dengan adanya layanan pengaduan, pelayanan medis, pelayanan psikologis dan rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, penegakan dan reintegrasi sosial. Layanan-layanan tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dengan beberapa instansi terkait yang dimana layanan tersebut dilaksanakan pula sesuai dengan kebutuhan para korban sehingga tidak dilaksanakan secara keseluruhan karena kebutuhan para korban yang berbeda-beda.

Pencegahan dari tindak kekerasan sendiri merupakan bentuk awal dari suatu pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru yang bertujuan mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Kota Pekanbaru. dalam pelaksanaan

pengecehan ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan kerja sama dengan beberapa instansi lainnya di Kota Pekanbaru seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Kepolisian, Akademisi, Pengacara, LSM, masyarakat dan instansi-instansi lainnya. Program Perlindungan Hukum, yaitu konsultasi penanganan kasus, advokasi penanganan kasus. Perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh dinas untuk dapat memberikan tempat atau wadah bagi para korban akibat kekerasan yang dialaminya khususnya perempuan dan memperoleh rasa aman. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Dinas yakni berupa rumah aman (shelter) yang merupakan rumah singgah sementara bagi korban, rumah duta revolusi mental (RDRM) yang merupakan rumah untuk pemulihan kondisi psikis korban, serta layanan konseling yang dilakukan oleh para psikolog.

10. Evaluasi Program

Dalam upaya melakukan pelaksanaan program perlindungan Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru mengalami kendala dalam pelaksanaan program tersebut sehingga belum memberikan dampak yang signifikan. pelaksanaan program masih terhambat oleh beberapa hal

seperti kurangnya komitmen dan komunikasi antar anggota, kurangnya ketersediaan sumber daya baik manusia, dan fasilitas.



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian ini dimana perencanaan komunikasi pada penelitian ini mengenai peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru dalam menencanakan program pencegahan kekerasan, sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru telah melaksanakan beberapa langkah dalam merumuskan strategi komunikasi sosialisasi, mulai dari mengenal khalayak, menyusun pesan, menetapkan metode hingga seleksi dan penggunaan media.
2. Pencegahan dari tindak kekerasan sendiri merupakan bentuk awal dari suatu pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru yang bertujuan mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Kota Pekanbaru. Dalam pelaksanaan pencegahan ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan kerja sama dengan beberapa instansi lainnya di Kota Pekanbaru seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Kepolisian, Akademisi, Pengacara, LSM, masyarakat dan instansi-instansi lainnya.
3. Penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru dalam mengsosialisasikan program mengenai pencegahan kekerasan

terhadap anak yaitu pola pikir masyarakat yang masih rendah, penentuan jadwal sosialisasi untuk sekolah-sekolah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan melalui hasil penelitian ini diberikan saran untuk pihak-pihak terkait sebagaimana bentuk refleksi dan evaluasi dari perencanaan komunikasi mengenai program pencegahan kekerasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, sebagai berikut:

1. Kepada pihak instansi terkait agar dapat mempertahankan regulasi yang telah dibangun mengenai alur hukum hingga pendampingan terhadap korban yang mengalami kekerasan.
2. Kepada korban yang tidak berani mencari keadilan sendiri, carilah lembaga bantuan hukum yang bersedia memberikan perlindungan hingga *recovery* pasca trauma dalam mengalami kekerasan khususnya ibu rumah tangga dan anak remaja.
3. Kepada pemerintah agar dapat memberikan tindakan represif kepada pelaku kekerasan agar perbuatan yang telah terjadi tidak terulang kembali dan menjadi penyesalan terdalam bagi pelaku tindak kejahatan seksual maupun kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarif Hidayat. 2015. *Perencanaan Komunikasi Hakekat dan Implementasinya*, Solo: Pustaka Iltizam.
- Bryson, John M. 2005. *Perencanaan strategis; Bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan. 2010. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali pers
- Cangara, H. Hafied. 2013. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Cangara, H. Hafied. 2015. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajawali pers
- Effendy, Onong Uchyana. 2000. *Ilmu, Teori, Dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Effendy, Onong Uchyana. 2003. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Prakteknya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Effendy, Onong Uchyana. 2008. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Erlinda. 2016. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya* diterbitkan oleh Kementrian Sosial RI.
- Hamidi. 2010. *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi*. Malang: UMM Pers.
- Hamijoyo, Santoso S. 2005. *Komunikasi Partisipatoris*. Bandung: Humaniora
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jkt. Salemba Humanika
- Husein, Umar. 2000. *Metodologi Penelitian*. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta
- Liliweri, Alo. 2011. *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Masrifah, Adelia Cahyani. *Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Kota Surabaya Melalui Media Sosial*. Ilmu Komunikasi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2019.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya
- Morissan. 2015. *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*. Jakarta: Kencana

Prenadamedia Group

Nurudin. 2015. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: Rajawali Press

Nasution, Zulkarimen. 2004. *Komunikasi Pembangunan: Pengenala Teori Dan Penerapannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Rangkuti, Freddy. 2006. *Teknik Mengukur dan Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Suharsimi, Arikunto. 2010. *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. (Edisi Revisi).

Suryanto. 2015. *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Sutaryo. 2004. *Dasar-Dasar Sosialisasi*, Jakarta: Rajawali Press.

Widjaja, 2000. *Ilmu Komunikasi Pengantar Studi*. Jakarta: PT Rineka Cipta,

Internet:

<http://djpp.depukumham.go.id/hukum>